

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBAGIAN LABA RUGI DALAM AKAD MUSYARAKAH**

(Studi Kasus di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh :

NOVIATUL RAHMAWATI
NIM. 122311088

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

H. Tolkah, MA.

Jl. Karonsih baru jaya No. 87 Ngaliyan Semarang

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Noviatul Rahmawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Noviatul Rahmawati

NIM : 122311088

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian
Laba Rugi Dalam Akad Musyarakah (Studi Kasus di
KJKS BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Mei 2018
Pembimbing I



H. Tolkah, MA.

NIP. 19690507 199603 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. Thoikhatul Khoir, M.Ag.

Jl. Pungkuran 133 Mranggen Demak

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Noviatul Rahmawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Noviatul Rahmawati

NIM : 122311088

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian
Laba Rugi Dalam Akad Musyarakah (Studi Kasus di
KJKS BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Mei 2018
Pembimbing II

Dr. Thoikhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Noviatul Rahmawati
NIM : 122311088
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Laba Rugi Dalam Akad Musyarakah (Studi Kasus di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

31 Mei 2018

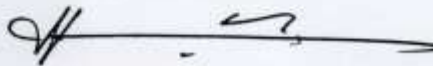
Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Semarang, Mei 2018

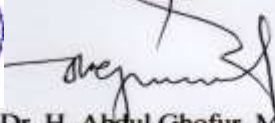
Dewan Penguji


Ketua Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 197110402 200501 1 004

Sekretaris Sidang

H. Tolkah, MA.
NIP. 19690507 199603 1 005

Penguji I

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005

Penguji II

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing I

H. Tolkah, MA.
NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing II

Dr. Thoikhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005



MOTTO

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (ص : ٢٤)

Artinya: *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dholim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh*".*

* Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 2006, h. 735-736.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya buat:

Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya hingga pada Dia lah segalanya bergantung. Nabi Muhammad SAW Sang inspirator hidup, Almameterku tercinta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

1. Ayahandaku tercinta Bapak Mohammad Romdhon dan Ibundaku tersayang Ibu Sofiatun yang memberikan dorongan dan semangat serta do'a suci dengan setulus hati.
2. Adikku yang tersayang Reza Widyastuti yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dwi Drajat Eryanto yang telah memberikan warna dalam hidupku. Terimakasih untuk setiap waktu dan motifasinya.
4. Teman-temanku Angkatan 2012 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang tak pernah ku lupakan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Rahim Nya, Amiin...

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Mei 2018

Deklator

Noviatul Rahmawati
NIM. 122311088

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang melakukan pola pembiayaan dengan mengedepankan proses saling menguntungkan antara pihak BMT dan anggota (nasabah) dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama, salah satu produk pembiayaan yang diminati adalah pembiayaan musyarakah, namun proses kerja sama tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti ketika pihak yang mendapatkan modal mengalami kerugian dalam usaha sehingga tidak bisa membayar bagi hasil sesuai kesepakatan bersama di awal akad menjadikan pihak BMT akan menagih dan melakukan pendekatan khusus agar modal usaha bisa berjalan sesuai akad, namun kerugian yang dialami oleh pihak anggota dan tidak ditanggung bersama antara BMT dan anggota menjadikan musyarakah hanya berdasarkan keuntungan dan tidak berlaku kerugian usaha.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang?. 2) Bagaimana praktik pembagian laba rugi dalam akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang?. 3) Bagaimana analisis hukum Islam tentang praktik pembagian laba rugi dalam akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). dengan pendekatan kualitatif, dengan sumber data dari manajer dan nasabah KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang. Data di peroleh dengan menggunakan teknik interview dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis data dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Proses akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dilakukan dengan melalui tahap sosialisasi, Permohonan Pembiayaan oleh nasabah, tahap investigasi dan tahap monitoring, setelah tahap ini dilakukan maka terjadi adanya akad pembiayaan musyarakah antara nasabah dan KSPPS NU Sejahtera dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. 2) Praktik pembagian keuntungan dalam akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dengan cara harus dikuantifikasikan, dibagikan secara proporsional atas dasar keuntungan, dan tidak ada jumlah yang ditetapkan diawal dan seorang mitra boleh mengusulkan, bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atas

prosentase itu diberikan kepadanya, sedangkan kerugian harus ditanggung para mitra.. 3) Analisis hukum Islam tentang praktik pembagian laba rugi dalam akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang pada dasarnya boleh karena laba dan kerugian merupakan kesepakatan bersama, namun beban biaya yang banyak dibebankan pada nasabah, adanya barang jaminan, dan adanya setoran bulanan menjadikan akad yang dilakukan seperti akad utang, sehingga nantinya ketika terjadi kerugian usaha nasabah beban kerugian akan banyak berada pada nasabah bukan ditanggung bersama.

Kata kunci: Hukum Islam, Praktik Pembagian, Laba Rugi, dan Akad Musyarakah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Afif Noor, S.Ag.,SH., M.Hum., selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas segala bimbingannya.
4. H. Tolkah, MA., selaku dosen pembimbing I dan Dr. Thoikhatul Khoir, M.Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat

berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Sakdullah, selaku Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang beserta karyawan-karyawannya yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian, dan nasabah KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang yang telah bersedia untuk memberikan informasi atas data-data yang dibutuhkan penyusun.
7. Seluruh keluarga besar penulis: Ayah, Bunda, Adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, Mei 2018

Penulis

Noviatul Rahmawati
NIM. 122311088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15
 BAB II AKAD MUSYARAKAH	
A. Akad Musyarakah.....	17
B. Pembagian Laba Rugi atau Bagi Hasil	39

BAB III	AKAD MUSYARAKAH DI KSPPS NU SEJAHTERA MANGKANG SEMARANG	
A.	Gambaran Umum KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang.....	49
B.	Proses Akad Musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang	62
C.	Praktik Pembagian Laba Rugi dalam Akad Musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang	83
BAB IV	ANALISIS PEMBAGIAN LABA RUGI DAN ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PEMBAGIAN LABA RUGI DALAM AKAD MUSYARAKAH DI KSPPS NU SEJAHTERA MANGKANG SEMARANG	
A.	Analisis Pembagian laba rugi di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang.....	90
B.	Analisis Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pembagian Laba Rugi di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	125
B. Saran-Saran.....	126
C. Penutup	127

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang No.10 tahun 1998 ” tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasar prinsip syariah”¹ Dengan landasan utama operasionalnya berdasar hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits patut disyukuri dan disambut gembira oleh segenap bangsa Indonesia dimana mayoritas penduduknya beragama Islam yang tentunya menginginkan syari’ah Islam dijalankan, diaplikasikan dalam berbagai kegiatan termasuk dalam hal perbankan dan diharapkan dapat meminimumkan dampak negatif dari krisis yang mungkin saja dapat dialami oleh ekonomi Indonesia pada masa mendatang.

Sejalan dengan pengertian Bank Syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah maka pelaku Bank Syariah harus melandaskan agama dalam operasionalnya dengan berdasar prinsip kejujuran, keadilan, larangan riba serta berpijak pada sendi-sendi ekonomi Islam.

¹ Susilo Sri Y., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, h. 109

Kehadiran BMT di tengah-tengah koperasi konvensional menawarkan sistem koperasi alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan atau jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba. Karena dalam Islam riba merupakan sesuatu yang dilarang.² Perbedaan pokok antara perbankan syari'ah dan konvensional adalah penghindaran riba dalam perbankan Islam. Riba dilarang sedangkan jual beli dihalalkan. Dengan demikian, maka bunga pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang. Kedudukan bank Islam dalam hubungan dengan nasabah adalah sebagai mitra, investor dan pedagang. Oleh karena itu, pemenuhan permodalan dan kebutuhan pembiayaan dilakukan melalui metode investasi dan *bai'*³

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan dan materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi Islam dalam segala kehidupan masyarakat.⁴

² Yusuf Qordhowi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, t.th., h. 364

³ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabet, 1990, h. 140

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonsia, 2004, h. 96

Proses penyaluran dana kepada masyarakat KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang menerapkannya di dalam lima produknya dengan akad *Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, BBA, Qordul Hasan* dan *Murabahah*. Sebagaimana yang dilakukan oleh KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang Sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis syariah juga melakukan pola pembiayaan dengan mengedepankan proses saling menguntungkan antara pihak BMT dan anggota (nasabah) dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama, salah satu produk pembiayaan yang diminati di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah merupakan semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.¹ Pembiayaan musyarakah ini adalah bentuk kerjasama yang memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak, karena porsi yang mereka distribusikan besarnya sesuai dengan kesepakatan mereka dan hasil yang mereka dapatkan adalah besarnya sesuai dengan yang mereka distribusikan serta kesepakatan yang mereka sepakati pada awal akad sehingga terhindar dari ketidakadilan.

Pembiayaan musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dilakukan dengan pemberian modal dapat berupa uang tunai atau aset bisnis. Jika modal berbentuk aset, terlebih dahulu harus dinilai dengan tunai dan disepakati oleh

semua pihak, dengan keuntungan yang dikuantifikasikan dan dibagikan secara proporsional atas dasar keuntungan, dan tidak ada jumlah yang ditetapkan diawal, misalnya seorang anggota mengajukan pembiayaan musyarakah untuk usaha ternak atau produksi makanan, maka pihak KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang akan memberikan modal terhadap usaha tersebut dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama.

Proses kerja sama tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti halnya dengan pihak yang mendapatkan modal dari KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang mengalami kerugian dalam usaha sehingga tidak bisa membayar bagi hasil sesuai kesepakatan bersama di awal akad menjadikan pihak BMT akan menagih dan melakukan pendekatan khusus agar modal usaha bisa berjalan sesuai akad, namun kerugian yang dialami oleh pihak anggota dan tidak ditanggung bersama antara BMT dan anggota menjadikan musyarakah hanya berdasarkan keuntungan dan tidak berlaku kerugian usaha.

Menurut Muhamad Syafi'i Antonio, *musyarakah* tercipta karena suatu kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian.⁵ Persekutuan ini dibangun atas prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*) masing-masing pihak menyerahkan

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2001, h. 91-92.

modalnya kepada mitranya, sekaligus menyerahkan kepercayaan serta izin untuk mengelolanya. Dengan kata lain, masing-masing persero (*syarik*) saling mewakili. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan, yang nisbahnya bisa berbeda atau sama, sedangkan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal.⁶

Berangkat latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul: “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Laba Rugi dalam Akad Musyarakah (Studi Kasus di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang)”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah pokok yang akan peneliti kaji dalam skripsi ini, dapat dikemukakan permasalahan nya sebagai berikut

1. Bagaimana proses akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang?
2. Bagaimana praktik pembagian laba rugi dalam akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik pembagian laba rugi dalam akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, h. 189

1. Untuk mendeskripsikan proses akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang.
2. Untuk mendeskripsikan praktik pembagian laba rugi dalam akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang.
3. Untuk menganalisis hukum Islam tentang praktik pembagian laba rugi dalam akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa penelitian yang dilakukan terdahulu relevansinya dengan judul skripsi ini. Adapun karya-karya skripsi tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan Endang Setyaningsih berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Musyarakah di Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Artha Surya Barokah Semarang*". Oleh yang membahas tentang praktek pembiayaan musyarakah di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Arta Surya Semarang yang dalam prakteknya masih kurang sesuai dengan konsep fiqh dimana BPRS Arta Surya masih menggunakan manajemen konvensional, terbukti dengan masih menggunakan jaminan

dan anggunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaan musyarakah.⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Buldan berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah Di BMT Desa Kec. Grabag Kab. Magelang*. Dalam temanya penulis mengungkapkan bentuk-bentuk usaha dan pinjam meminjam uang harus mengikuti ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadits yang salah satunya membahas tentang prinsip bagi hasil yang dikenal dengan 3 istilah, yaitu: a). Musyarakah, ialah perjanjian kerja sama antara dua belah pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dapat dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing. b). Mudharabah, ialah perjanjian dua belah pihak. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya dan pengusaha setuju mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang telah disepakati sebelumnya. c). Muzara'ah, ialah memberikan lahan pertanian

⁷ Endang Setyaningsih, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan musyarakah Di Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah BPRS Artha Surya Barokah Semarang*. Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: perpustakaan Syariah, IAIN Walisongo

kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (prosentase dari hasil panen).⁸

3. Penelitian Zakiyudin berjudul *Analisis Hikum Islam terhadap Prosedur Pembiayaan Musyarakah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang*. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan bagi hasil pada BSM Semarang, pelaksanaanya berdasarkan akad yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak dan berdasarkan akad nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan oleh BSM Semarang sesuai dengan omset. Dalam prosedur musyarakah BSM Semarang sesuai dengan syari'at Islam karena tidak ada unsur riba (bunga) dan *gharar* didalamnya. Selain itu BSM Semarang juga memiliki Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi agar produk-produk yang ditawarkan BSM Semarang tidak menyimpang dari kaidah-kaidah syari'ah. Dalam pelaksanaan musyarakah di BSM memiliki mekanisme yang sesuai dengan karakteristik yang digambarkan hukum Islam.⁹

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti kaji tentang pembiayaan musyarakah, namun penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada analisis

⁸ Ahmad Buldan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah Di BMT Desa Kec. Grabag Kab. Magelang*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: perpustakaan Syariaah, IAIN Walisongo, 2004.

⁹ Zakiyudin, *Analisis Hikum Islam terhadap Prosedur Pembiayaan Musyarakah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Syariaah, IAIN Walisongo, 2008

hukum Islam pada proses pembagian laba dan rugi yang tentunya tidak dikaji secara spesifik pada penelitian di atas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, obyek penelitiannya adalah berupa obyek di lapangan yang sekiranya mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara *holistic* (menyeluruh).¹⁰ Dengan pendekatan kualitatif ini peneliti mencoba memahami dan menggambarkan secara menyuruh obyek yang diteliti dalam hal ini praktik pembagian laba rugi dalam akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu: data yang diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber

¹⁰ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002, h. 3

informasi yang dicari Sumber data ini diperoleh dari manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dan angoota.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹¹ Atau dengan kata lain dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi/data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan artikel tentang akad musyarakah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud penyelidikan atau penelitian di mana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.¹²

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pedoman wawancara *semi structured* yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti responden diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas

¹¹ *Ibid*, h. 3

¹² *Ibid*, h. 135

tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.¹³ Bentuk wawancara ini tidak membuat peneliti kaku, melainkan lebih bebas dan luwes dalam melakukan wawancara.¹⁴

Metode ini digunakan peneliti untuk mengadakan wawancara tentang praktik akad musyarakah dan praktik pembagian laba rugi dalam akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang. Adapun yang termasuk informan disini adalah manajer dan nasabah/ Anggota BMT.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.¹⁵ Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi umum, dokumen perjanjian, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang

Dari ketiga hal tersebut apabila dibuat matrik adalah sebagai berikut:

¹³ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Madah University Press, 2005, h. 23.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 148

¹⁵ *Ibid*, h. 206.

No	Sumber Data	Metode
1	Peristiwa	Observasi
2	Informan	Wawancara
3	Dokumen	Analisis Data

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.¹⁶ Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis (ide) kerja seperti yang disarankan data.¹⁷ Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, h. 6

¹⁷ *Ibid.*, h. 103

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 6-7.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan, dan tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini mulailah tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.¹⁹

Teknik analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.²⁰ Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis (ide) kerja seperti yang disarankan data.²¹ Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak

¹⁹ Lexy. J. Moleong, *op.cit.*, h. 190

²⁰ *Ibid.*, h. 6

²¹ *Ibid.*, h. 103

bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.²²

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan, dan tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini mulailah tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.²³

Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.²⁴

Metode deskriptif yang peneliti gunakan ini mengacu pada analisis data secara induktif, karena: 1). Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 6-7.

²³ Lexy. J. Moleong, *op.cit.*, h. 190

²⁴ Saifuddin Azwar, *op.cit.*, h. 6-7.

terdapat dalam data, 2). Lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel, 3). Lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya, 4). Analisa induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan, 5). Analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian struktur analitik²⁵ Analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis hukum Islam tentang praktik pembagian laba rugi dalam akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan yang terdiri dari pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, Tujuan penelitian, Telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Berisi analisis umum tentang akad musyarakah yang terdiri dari pengertian musyarakah, dasar

²⁵ Lexy. J. Moleong, *op.cit*, h. 10

hukum musyarakah, syarat dan rukun musyarakah, tujuan dan manfaat musyarakah, macam-macam musyarakah, berakhirnya akad musyarakah.

Bab Ketiga berisi tentang akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama mengenai gambaran umum KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang yang terdiri sejarah berdiri, visi misi, struktur organisasi dan fasilitas. Sub bab kedua berisi mengenai proses akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang. Sub bab ketiga tentang praktik pembagian laba rugi dalam akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang.

Bab Keempat Berisi analisis analisis hukum Islam tentang praktik pembagian laba rugi dalam akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari Kesimpulan, Saran-Saran, dan Penutup.

BAB II

AKAD MUSYARAKAH DAN PEMBAGIAN LABA RUGI

A. Akad Musyarakah

1. Pengertian Akad Musyarakah

Menurut M. Ali Hasan, *akad*. berasal dari Bahasa Arab adalah (العقد) yang berarti "Perkataan, Perjanjian dan Permufakatan". Pertalian *ijab* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.¹

Menurut Abdul Aziz Dahlan, *Akad* adalah (*a'qada- 'aqd* = perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*), pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.²

Menurut Rachmad Syafi'i, *Akad* adalah perikatan atau perjanjian. Dari segi etimologi, *Akad* adalah:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءَ أَكَانَ رِبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ
جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 101

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 63

Artinya: “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dari dua segi”.³

Menurut Az Zarqo dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.⁴

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy akad menurut bahasa (*lughah*) adalah:

الربط: وهو جمع طرفي حبلين ويشد أحدهما بالأخر حتى يتصلا
فيصبح كقطعة واحدة

Artinya: “Akad adalah *al-rabth* (ikatan), yaitu menyambungkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sampai bersambung, sehingga keduanya menjadi satu bagian”.⁵

Menurut Hendi Suhendi pengertian akad menurut bahasa mempunyai beberapa arti antara lain:⁶

- a. Mengikat (الربط) yaitu ikatan; seperti pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy diatas.⁷

³ Rachmad Syafi’i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Gema Insani, 2000, h. 43

⁴ Gemala Dewi dan Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grop, 2005, h. 48

⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 26

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 44

b. Sambungan (عقدة) yaitu:

المُوصِلُ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا وَيُؤْتِي ثَقُفَهُمَا

Artinya: “Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”.

c. Janji (العهد) sebagaimana di jelaskan dalam al Qur’an :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧٦)

Artinya: “Ya, siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa”.

(QS. Ali Imron: 76)⁸

Sedangkan definisi akad menurut ulama fiqih, yakni menurut ulama Madzab Hanafi, terdapat dua pendapat. *Pertama*, didasarkan pada dalil qiyas (analogi). Akad ini tidak sah karena obyek yang dibeli belum ada, oleh sebab itu akad ini termasuk dalam *al bay al ma'dum* (jual beli terhadap sesuatu yang tidak ada) yang dilarang Rasulullah. *Kedua*, madzab Hanafi membolehkan *akad* ini didasarkan kepada dalil *istihsan* (berpaling dari kehendak *qiyas* karena ada indikasi yang kuat yang membuat pemalingan ini) dengan meninggalkan kaidah *qiyas*. Ulama Madzab Syafi'i juga berpendapat sebagian mereka berpegang dengan kaidah *qiyas*,

⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, h. 26

⁸ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 44

sehingga mereka berpendapat bahwa akad ini tidak boleh karena bertentangan dengan akidah umum yang berlaku yaitu obyek yang ditransaksikan itu harus nyata.⁹

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁰

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia 2003, definisi *al-Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *Musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.¹¹ Istilah lain dari *al-Musyarakah* adalah *Syirkah*. *Syirkah* berarti *Ikhtilath* (percampuran).¹² *Syirkah* adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama baik dalam bidang modal atau jasa antara sesama pemilik modal dan jasa

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, h. 779

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, h. 90.

¹¹ Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia 2003.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, Bandung: PT. Al Ma'arif, t.th., h.

tersebut, artinya dua orang atau lebih berserikat di dalam jumlah tertentu, guna memperoleh keuntungan bagi mereka bersama.¹³

Musyarakah atau sering disebut *sharikah* atau *syirkah* berasal dari *fiil madhi* (شَرَكَ - يَشْرِكُ - شِرْكًا - وَشَرَكَةً) yang mempunyai arti : sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan.¹⁴

Syirkah dari segi etimologi berarti : *الْإِخْتِلَافُ* mempunyai arti : campur atau percampuran. Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi.¹⁵

Definisi *syirkah* menurut mazhab Maliki adalah suatu izin ber-*tasharruf* bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Menurut mazhab Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*. Menurut Syafi'i, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.¹⁶

¹³ Moh Rifai, *Jawahirul fiqhi Mutiara Fiqih Jilid II*, Semarang: CV. Wicaksana, 1998, h. 768.

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: A Munawwir, t.th., h. 765.

¹⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh'ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz III, Lebanon: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyyah, 1990, h. 60.

¹⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h.192

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *syirkah* adalah akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.¹⁷ M. Ali Hasan mengatakan bahwa *syirkah* adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.¹⁸

Berdasarkan pengertian *syirkah* diatas, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian.

2. Dasar Hukum Akad Musyarakah

Dalam Al Quran Allah SWT berfirman dalam QS. Shaad : 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (ص : ٢٤)

Artinya: *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dholim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-*

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, op.cit., h. 193.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 161.

*orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh”.*¹⁹

T.M. Hasbi Ash Shidieqy menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena merekalah yang tidak mau mendalami orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu.²⁰

Dan juga dalam QS. An Nisa' : 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (النساء : ١٢)

Artinya: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang di buat olehnya atau sesudah dibayarutangnya dengan tidak memberi madhorot (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun”.²¹

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 2006, h. 735-736.

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, h. 3505.

²¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 117

M. Quraish Shihab menerangkan bahwa bagian waris yang diberikan kepada saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan yang lebih dari seorang, maka bagiannya adalah sepertiga dari harta warisan, dan dibagi rata sesudah wasiat dari almarhum ditunaikan tanpa memberi madhorot kepada ahli waris.²²

Dari kedua ayat diatas menunjukan bahwa Allah SWT mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja QS. Shaad : 24 menyebutkan perkongsian terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*), sedangkan. QS. An Nisa menyebutkan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis (*Jabr*) karena waris.²³

Dalam Hadis dinyatakan sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا. (رواه ابو داود بسند صحيح)

Artinya: “Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya (temannya).

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 366.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h. 130.

Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka”(H.R Abu Dawud).²⁴

Hadist ini menerangkan, bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya. Koperasi akan jatuh nilainya jika terjadi penyelewengan oleh pengurusnya. Inilah yang diperingatkan Allah SWT, bahwa dalam berkoperasi masih banyak jalan dan cara yang memungkinkan untuk berkhianat terhadap sesama anggotanya. Itulah koperasi yang di jauhi atau diangkat berkahnya oleh Allah SWT, maka kejujuran harus diterapkan kembali.

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah.²⁵

عَتَ السَّائِبُ الْمَحْزُومِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَهُ كَاتَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَبْلَ فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأَخِي وَ شَرِيكَ
(رواه احمد و ابو داود وابن ماجه)

Artinya: "*Dari Saib Al-Makhzumi sekutu Nabi Muhammad SAW sejak Sebelum jadi Rasul, ia datang pada hari penaklukan Makah, maka ia berkata,*

²⁴ TM. Hasbi As-Sidiqqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: PT. Petrajaya Mitrajaya, 2001, h. 175

²⁵ Ash-Shon'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1998, h. 64.

dipersilahkan selamat datang saudaraku dan sekutuku". (HR. Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dan dari riwayat yang sama

عت السائب ابت ابى السائب, اته قال للتبى صلى الله عليه وسلم :
كنت شريكى فى الجاهليه, فكنت خير شريك لاتدارين ولا تمارينى
(رواه احمد و ابو داود وابن ماجه)

Artinya: *"Dan dari Saib bin Abi Saib, sesungguhnya ia berkata kepada Nabi SAW: engkau pernah menjadi kongsiku pada (zaman) jahiliyah, (ketika itu) engkau adalah kongsiku yang paling baik. Engkau tidak mencegah aku, dan tidak mengata-ngatai kepadaku". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)*²⁶

Dengan melihat hadis tersebut diketahui bahwa masalah serikat (koperasi) sudah dikenal sejak sebelum Islam datang, dan dimuat dalam buku-buku ilmu fiqh Islam. Dimana koperasi termasuk usaha ekonomi yang diperbolehkan dan termasuk salah satu cabang usaha.

²⁶ *Ibid.*, h. 64

3. Tujuan dan Manfaat Akad Musyarakah

Kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti mempunyai tujuan tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan. Oleh karena itu, maka tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak, dipandang halal atau haram.

Yang dimaksud dengan tujuan akad adalah maksud utama disyari'atkan akad.²⁷ Tujuan akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat-akibat hukum diperlukan adanya syarat tujuan sebagai berikut:

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan.
- b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- c. Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara'.²⁸

Berdasarkan pada pernyataan syarat tujuan akad yang tertera di atas, sudah jelas dan diakui oleh syara' akan tetapi suatu

²⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 61.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Bag Penerbit Fak Hukum UII, 2000, h. 99-100

tujuan erat kaitannya dengan berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan contohnya dalam hal jual beli tujuannya untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli

Tujuan dari pada syirkah itu sendiri yaitu: memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah dan sebagainya.²⁹

Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak di pakai dalam perbankan syari'ah adalah *musyarakah*. Dimana *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.³⁰

Adapun manfaat-manfaat yang muncul dari pembiayaan *Musyarakah* yaitu meliputi :³¹

- a. Lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

²⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 125.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h. 129.

³¹ *Ibid.*, h. 133-134.

- b. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- c. Lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan.
- d. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Adapun resiko yang terjadi dalam pembiayaan *Musyarakah*, relatif tinggi :

- a. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
 - b. Nasabah sering Lalai dalam usaha dan melakukan kesalahan yang disengaja guna kepentingan diri sendiri.
 - c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur dan pihak lembaga keuangan sulit untuk memperoleh data sebenarnya
4. Macam-Macam Akad Musyarakah

Pembahasan mengenai macam-macam syirkah, para ulama' fiqih memberikan beberapa macam syirkah, sebagian ulama' ada yang memperoleh syirkah tertentu dan ada yang

melarang syirkah tertentu pula. Ulama fiqih membagi syirkah dalam dua bentuk, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*.³²

a. *Syirkah Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah Amlak berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakili dan mewakili terhadap partnernya. Bentuk *syirkah amlak* ini terbagi menjadi dua yaitu:³³

- 1) *Syirkah Ikhtiari*, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas untuk menerima atau menolak. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Hal ini dapat terjadi apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga
- 2) *Syirkah Jabari*, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka

³² Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: CV. Alfabeta, 2003, h. 251.

³³ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta; PSEI, 2003, h. 34

b. *Syirkah Uqud*

Syirkah uqud berarti perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak, syirkah ini terbagi menjadi (lima) 5 jenis yaitu:

1) *Syirkah Inan*

Para fuqaha Madzab-Madzab fiqh islam mendefinisikan sebagai berikut:

Madzab Hambali: ber-syirkahnya dua orang atau lebih dengan suatu modal yang diberikan oleh masing-masing dari mereka, baik ketika akad ataupun ketika pembelian dengan tujuan berdagang dalam satu macam perdagangan, dengan kesamaan modal tanpa kesamaan keuntungan atau sebaliknya jika kelebihan keuntungan adalah bagi orang yang paling banyak kerjanya dari mereka³⁴

Madzab Maliki: bersyirkahnya dua orang atau lebih dengan ketentuan tidak ada yang mengelola harta *syarikah* kecuali dengan kehadiran dan kesertaan mitranya atau dengan sejinnya.³⁵

Madzab Syafi'i: bersyirkahnya dua orang atau lebih dengan mencampurkan modal mereka sehingga

³⁴ Kamal Ibnu Humam, *Fathul Qadir*, Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th., h.5

³⁵ Al Khathab, *Mawahibul Jalil*, Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th., h. 134

harta salah satu pihak tidak dapat dipisahkan dari harta pihak yang lain, yang digunakan untuk berdagang dan keuntungannya dibagi antara mereka menurut rasio modal mereka.³⁶

Madzab Hamballi: bersyirkahnya dua orang dengan harta mereka untuk usaha pada modal itu dengan badan mereka dan keuntungannya adalah dibagi antara mereka berdua atau bersyirkatnya dua orang dengan harta mereka untuk salah satu keduanya berusaha pada modal itu dengan syarat keuntungan untuknya lebih banyak dari keuntungan modalnya.³⁷

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan *musyarakah inan* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar *profit and loss sharing* (membagi untung dan rugi) sesuatu dengan jumlah modal masing-masing. *Syirkah* macam itu disepakati oleh ulama tentang bolehnya (ijma' ulama).

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, h. 146

³⁷ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th., h. 14

2) *Syirkah Mufawadhah*

Para fuqaha berbeda-beda dalam mendefinisikan mengenai *syirkah mufawadah*.

Menurut Madzab Hanafi: suatu *syirkah* yang berdiri berdasarkan pada prinsip persamaan antara dua orang dalam kewenangan dan kemampuan pengelolaan, modal dan agama.³⁸

Madzab Maliki: masing-masing dua orang atau lebih yang bersyarat menyerahkan kepada mitranya kebebasan mengelola modal syarikat untuk kepentingan syarikat.³⁹

Menurut Madzab Syafi'i *syirkah mufawadah* adalah tidak sah. Syafi'i mengemukakan alasan bahwa sebutan serikat itu hanya berlaku bagi pencampuran harta, karena keuntungan itu bercabang-cabang. Sedangkan cabang-cabang ini tidak bisa diperoleh bersama, kecuali berasal dari modal yang sama. Jika masing-masing pihak mensyaratkan keuntungan bagi pihak yang lain pada milik dirinya, maka ini termasuk penipuan dan kerancuan yang tidak diperbolehkan. Inilah sifat dari *syarikah mufawadah*⁴⁰

³⁸ Al Kasani, *Badai' Ash Shanai'*, Juz 6, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th., h. 58

³⁹ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 225

⁴⁰ *Ibid*, h. 269

Menurut Madzab Hambali *syirkah* ada dua macam yaitu *pertama* suatu penyerahan oleh masing-masing orang yang bersyirkah kepada mitranya dalam pembelian dan penjualan dalam mudharabah, penguasaan, bepergian dengan modal, menggadaikan dan menjadikannya agunan serta jaminan untuk usaha.

Kedua suatu *syirkah* yang melibatkan kedua orang bersyirkah dalam suatu keikutsertaan dalam hal yang dihasilkan oleh masing-masing keduanya dari warisan atau hhibah, atau apa yang didapatkannya dari barang temuan, harta karun dan sebagainya, sebagaimana masing-masing saling menanggung tebusan atau ganti rugi tindak kriminal, menanggung barang rampasan, mengganti harga barang yang dilenyapkan, denda jaminan dan *kafalah*.

Mufawadah semacam ini tidak boleh menurut Madzab Hambali, karena terdapat unsur *gharar* (penipuan), sebab jika terjadi *gharar* maka hukumnya batal.⁴¹

Mengenai syarat-syarat syarikah mufawadah yang diperselisihkan oleh malik dan abu hanifah terletak pada modal, menurut hanifah syarat syarikah

⁴¹ Ibnu Qudamah, *op.cit.*, h. 21

mufawadah adalah adanya kesamaan modal antara kedua belah pihak yang berserikat. Sedang menurut imam malik, kesamaan modal tidak menjadi syarat, karena disamakan dengan *syarikah inan*

3) *Syirkah Abdan*

Para fuqaha' berbeda-beda dalam mendefinisikan *syirkah abdan* yaitu sebagai berikut:

Madzab Hanafi: berserikatnya dua orang untuk menerima order pekerjaan dan penghasilannya adalah dibagi antara mereka berdua, seperti tukang jahit ⁴²

Madzab Maliki: berserikatnya dua tukang atau lebih untuk bekerjasama dan saling membagi upah pekerjaan mereka sesuai dengan pekerjaan masing-masing, keduanya dalam pekerjaan melibatkan pekerjaan mitranya atau saling mendekati dalam pekerjaan.

Madzab Syafi'i: berserikatnya dua orang atau lebih, masing-masing bekerja dengan ketrampilannya secara sama atau berbeda, baik dengan kesatuan pekerjaan atau dengan pekerjaan yang berbeda. ⁴³

⁴² Kamal Ibnu Humam, *op.cit.*, h. 28

⁴³ Asy Syirazi, *Al Muhadzab*, Juz 1, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th., h. 246

Madzab Hambali: berserikatnya dua orang atau lebih dalam apa yang mereka hasilkan dengan ketrampilan tangan mereka, seperti tukang yang berserikat untuk mengerjakan karya mereka atau mereka berserikat dalam apa yang mereka hasilkan dari barang yang halal, seperti berburu.⁴⁴

4) *Syirkah Wujud*

Para fukuha mendefinisikan *sirkah wujud* bermacam-macam diantaranya sebagai berikut :

Madzab Hanafi: berserikatnya dua orang atau lebih tanpa modal bagi keduanya untuk sama-sama membeli dan dengan nama baik mereka.⁴⁵

Madzab Maliki: berserikatnya dua orang atau lebih tanpa modal harta dan karya, ia adalah syarikat berdasarkan tanggung jawab moril yang mana jika mereka membeli sesuatu maka berada pada tanggungan mereka berdua dan jika menjualnya mereka saling berbagi keuntungan.⁴⁶

Madzab Syafi'i: berserikatnya dua orang yang memiliki reputasi di masyarakat karena kebaikan keduanya dalam berbisnis (Mu'amalah) dengan mereka, untuk masing-masing mereka membeli

⁴⁴ Ibnu Qudamah, *op.cit.*, h. 5

⁴⁵ Al Kasani, *op.cit.*, h. 57

⁴⁶ Al Khathab, *op.cit.*, h. 141

dengan tangguh bayar (tempo) dan barang yang dibeli milik keduanya. Jika mereka menjualnya maka kelebihan harga jual di bagi antar mereka.

Madzab Hambali: Berserikatnya dua orang dalam barang yang mereka beli dengan nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka tanpa memiliki modal financial. Dengan kesepakatan bahwa apa yang mereka beli kepemilikannya dibagi antar mereka secara tengahan, pertigaan, perempatan atau sebagainya dan mereka menjualnya, maka hasil dari jual beli dibagi antar mereka.⁴⁷

Jadi dapat disimpulkan *sirkah wujuh* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan pengusaha dengan perjanjian profit sharing (keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan bagian (masing-masing). Ulama Hanafi dan Hambali membolehkan *syirkah* itu karena mengandung unsur *wakalah*⁴⁸ yang diperbolehkan secara syar'i, sedangkan ulama syafi'i dan malik

⁴⁷ Ibnu Qudamah, *op.cit.*, h. 14

⁴⁸ *Wakalah* ialah pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu untuk diperkenankan oleh syariat. Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 269

melarangnya, karena menurut mereka syirkah hanya boleh dengan uang atau pekerjaan, sedangkan uang dan pekerjaan tidak terdapat dalam *syirkah* ini, disamping itu terdapat unsur *gharar*, kerana masing-masing mitra memberi kompensasi kepada mitranya lewat suatu mata pencaharian yang tidak jelas tanpa suatu karya atau pekerjaan khusus.

c. *Syirkah al-amwal*

Syirkah al-amwal adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.⁴⁹ Dalam *syirkah al-amwal* ulama fiqih mengemukakan akad syirkah dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal syirkah hilang, karena obyek dalam syirkah ini adalah harta. Dengan hilangnya harta syirkah berarti syirkah itu bubar.⁵⁰

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, dalam syirkah ada syarat khusus bagi *syirkah al-amwal*, yaitu sebagai berikut:⁵¹

- 1) Modal perseroan harus hadir, baik ketika akad maupun ketika akan dilakukan pembelian barang ini

⁴⁹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 196

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1715

⁵¹ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 125-126

adalah pendapat jumhur fuqaha, maka tidak diperkenankan yang modalnya masih berupa hutang, maupun modalnya masih belum bisa dihadirkan.

- 2) Modal perseroan berupa uang, ini adalah kesepakatan empat mazhab, maka perserikatan yang modalnya berbentuk barang, baik barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak maupun tidak bergerak, tidak diperkenankan

Sedangkan menurut Rachmat Syafei persyaratan khusus pada syirkah amwal adalah sebagai berikut:⁵²

- 1) Modal syirkah harus ada dan jelas
- 2) Modal harus bernilai atau berharga secara mutlak

B. Pembagian Laba Rugi atau Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil (*profit sharing*) merupakan sistem yang berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia dan bukan bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi semata, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan.⁵³

Sistem bagi hasil biasa diterapkan di KSPPS atau lembaga-lembaga keuangan syari'ah lainnya karena prinsip bagi hasil selaras dengan syari'at Islam yang melarang adanya

⁵² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 194.

⁵³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 11.

praktek *riba* dalam menjalankan suatu usaha, Dan sistem bagi hasil merupakan sistem yang terbebas dari unsur-unsur *riba*.

Sistem bagi hasil lebih memperhatikan nilai-nilai sosial, hal ini terlihat pada definisi bagi hasil berikut.

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil dari hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini bisa terjadi antara lembaga keuangan dengan penyimpan dana, maupun lembaga keuangan dengan nasabah penyimpan dana. Bentuk produk yang berdasarkan pada prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah.⁵⁴ Sistem ini bisa dilakukan pada suatu kerja sama antara kedua pihak atau lebih dengan cara melakukan kesepakatan tentang besar kecilnya prosentase (*nisbah*) yang akan di peroleh sesuai dengan akad yang dilakukan kedua belah pihak, *nisbah* dihitung dari keuntungan yang diperoleh, dan bila terjadi kerugian maka ditanggung kedua belah pihak.⁵⁵

Dari definisi tersebut bisa terlihat bahwa sistem bagi hasil lebih manusiawi dalam memberikan tawaran kepada nasabahnya, karena dalam pembagiannya terjadi atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak sesuai dengan porsi kerja dan modal masing-masing, dan ini dibangun atas prinsip saling rela (*antarodlin*), jadi salah satu pihak tidak ada

⁵⁴ Muhamad ed, *Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003, h. 18

⁵⁵ *ibid*, h. 58.

yang merasa dirugikan, baik dari pihak KSPPS maupun dari pihak nasabahnya.

2. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

Dalam suatu perbankan konvensional dikenal dengan adanya bunga (*interest/usury*) sedangkan dalam perbankan syari'ah dikenal dengan adanya bagi hasil (*profit sharing*), kedua sistem ini tujuannya hampir sama, namun istilah dan mekanismenya berbeda. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus di bayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).⁵⁶

Sedangkan bagi hasil adalah seperti yang terdapat dalam definisi bagi hasil yang telah penulis sebutkan di atas yaitu suatu sistem dalam membagi hasil dari keuntungan pada suatu kerjasama antara kedua pihak atau lebih dengan cara melakukan kesepakatan tentang besar kecilnya prosentase (*nisbah*) yang akan di peroleh sesuai dengan akad yang dilakukan kedua belah pihak, *nisbah* dihitung dari keuntungan

⁵⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 121

yang diperoleh, dan bila terjadi kerugian maka ditanggung kedua belah pihak.⁵⁷

Dari masing-masing definisi bunga dan bagi hasil sudah terlihat perbedaan yang cukup mendasar. Untuk lebih memperjelas perbedaan antara bunga dan bagi hasil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.1
Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil⁵⁸

No	Bunga	Bagi Hasil
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2	Besarnya presentase berdasarkan jumlah uang dan modal yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak
4	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai peningkatan jumlah pendapatan

⁵⁷ Muhammad *ed, op. cit.*, h. 58.

⁵⁸ Lasmiatun, *Op.Cit*, h. 10

	atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i>	
5	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak di kecambah), oleh semua agama termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Selain perbedaan bunga dan bagi hasil dari segi mekanismenya yang telah disebutkan pada tabel diatas juga ada perbedaan dari segi dampak yang ditimbulkan dari keduanya, diantaranya adalah :

- a. Sistem bunga dapat menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas dia mendapatkan tambahan pendapatan yang rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi dan kreativitas dalam bekerja. Sedangkan sistem bagi hasil tidak karena dalam sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian di tanggung bersama.
- b. Sistem bunga dapat menimbulkan dampak yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Bagi orang yang mempunyai pendapatan lebih akan banyak mempunyai kesempatan untuk menaikkan pendapatannya dengan membungakan pinjaman pada orang lain. Sedangkan bagi orang yang mempunyai pendapatan

cukup tidak hanya kesulitan dalam membayar cicilan uang tapi juga harus memikirkan bunga yang akan dibayarkan. Sedangkan sistem bagi hasil tidak, karena besar kecilnya keuntungan tidak selalu sama sehingga bagi hasil yang diberikan disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh.

- c. Tingkat suku bunga tinggi menurunkan minat untuk berinvestasi. Investor akan memperhitungkan besarnya harga pinjaman atau bunga bank. Investor tidak mau menanggung biaya produksi yang tinggi yang diakibatkan biaya bunga dengan mengurungi produksinya. Bila hal ini terjadi maka akan mengurangi kesempatan kerja dan pendapatan sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam sistem bagi hasil tidak mengenal istilah suku bunga, jadi tidak ada pengaruhnya terhadap suku bunga tinggi maupun rendah.⁵⁹

3. Mekanisme Penentuan Nisbah dalam Bagi Hasil

“*Nisbah*” berasal dari bahasa arab yang kata asalnya adalah *al nisbatu* النسبة / النسبة المئوية yang artinya adalah perimbangan / prosentase⁶⁰, jadi yang dimaksud dengan nisbah adalah perimbangan / prosentase / rasio yang didapatkan oleh masing-masing pihak yang melakukan akad

⁵⁹ Heri Sudarsono, *loc. cit.* h. 12.

⁶⁰ Munawir Abdul Fatah, Muhammad Adib Bisri, *AL-BISRI Kamus Arab Indonesia Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999, h. 171

usaha bersama, atau dalam suatu lembaga keuangan syari'ah yaitu antara nasabah dan lembaga keuangan syari'ah.

Dalam lembaga keuangan syari'ah (termasuk di dalamnya adalah KSPPS) hubungan antara bank dan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibulmaal*) dengan pengelola dana (*mudharib*).⁶¹

Mekanisme penentuan nisbah tidak selalu sama, seperti sistem bunga yang berlaku di bank konvensional akan tetapi nisbah yang didapatkan sesuai dengan akad, kesepakatan, dan kontribusi dana (modal) yang diberikan dalam kerja sama antara nasabah dan KSPPS /bank syari'ah.

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya shahibul mal

⁶¹ Heri Sudarsono, *loc. cit.* h. 45.

mendapatkan Rp 50 ribu, mudharib mendapatkan Rp 50 ribu.⁶²

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al musyarakah*, *al mudharabah*, *al muzaro'ah*, *al musaqah*. Sungguhpun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarakah* dan *al mudharabah*, sementara *al muzaro'ah* dan *al musaqah* dipergunakan khusus *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.⁶³

Akad yang sering digunakan dalam satu bank syari'ah maupun KSPPS adalah :

a. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶⁴

Musyarakah dibagi menjadi 4:

1) *Syirkah 'inan* :

⁶² Adiwarmar Karim, *op. cit.*, h. 206.

⁶³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, Jakarta : Tazkia Institut, cet. Ke-1, 1999, h. 129

⁶⁴ *ibid*, h. 129.

Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja namun porsi dana tidak harus sama. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka.

2) *Syirkah mufawadhah* :

Syarat utama dari *syirkah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban hutang dibagi masing-masing pihak.

3) *Syirkah a'mal* :

Kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

4) *Syirkah wujuh*

Kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka baerbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis ini tiak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar jaminan

tersebut, maka kontrak ini lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.⁶⁵

b. *Mudharabah*

Mudharabah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan bila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola.⁶⁶

Mudharabah ada dua :

1) *Mudharabah muthlaqah*

Kerjasama yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, an daerah bisnis.

2) *Mudharabah muqayadah*

Mudharabah muqayadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.⁶⁷

⁶⁵ *ibid*, h. 130.

⁶⁶ *Ibid*, h. 135.

⁶⁷ *Ibid*, h. 137.

BAB III

AKAD MUSYARAKAH DI KSPPS NU SEJAHTERA MANGKANG SEMARANG

A. Gambaran Umum KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang

1. Sejarah Berdirinya KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang

Apabila kita mengikuti perjalanan siroh Nabi Muhammad SAW, maka dapat kita ketahui bahwa kehidupan nabi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: sebagai Nabi/Rasul dan yang dua sebagai pedagang (ekonom). Bahkan usia beliau yang digunakan sebagai pedagang lebih panjang dari pada sebagai rasul. Profesi sebagai pedagang inilah yang mendukung kelancaran dan keberhasilan dakwah islamiyah beliau. Menurut teori kebutuhan, bahwa kebutuhan biologis berupa tercukupinya makan dan minum merupakan kebutuhan pertama yang harus dipenuhi sebelum kebutuhan-kebutuhan yang lain. Bahkan menurut hadist rasulullah bahwa kemiskinan (tidak tercukupinya kebutuhan dasar, makan dan minum) akan mendekatkan manusia kepada kekafiran. Oleh

karena itu membangun ekonomi rakyat merupakan persyaratan dalam melakukan dakwah islamiyah.¹

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Nahdlatul Ulama' sebagai organisasi sosial keagamaan memandang perlu melakukan/menggarap bidang ekonomi yang berorientasi kepada kepentingan Nahdliyyin/umat. Bahwasanya sejak bulan November 2001, lembaga perekonomian MWC NU Gunungpati telah mengembangkan unit usaha depo minyak tanah. Maka melalui beberapa anggotanya, pada tanggal 29 Mei 2003 dengan akte pendirian koperasi nomor: 180.80/315 mendirikan koperasi "BUMI SEJAHTERA", disamping Juni 2003 telah membuka unit usaha Toserba.²

Koperasi "BUMI SEJAHTERA" sebagai kepanjangan tangan dari Lembaga Perekonomian NU (LPNU) bertekad melakukan kegiatan usaha yang sepenuhnya berdasarkan syariat islam selama mempunyai kemampuan dalam melaksanakannya. Pada tanggal 25 April 2008, berdasarkan Surat Keputusan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota No 180.80/PAD/XIV.34/02, koperasi "BUMI SEJAHTERA" berubah nama menjadi Koperasi NU Sejahtera.

¹ Dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang di kutip pada tanggal 29 Agustus 2017

² Dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang di kutip pada tanggal 29 Agustus 2017

Sebagai badan usaha koperasi, harus dikembangkan dengan baik seperti badan usaha lainnya. Disamping itu, sebagai organisasi ekonomi, koperasi harus mengikuti hukum-hukum ekonomi yang rasional serta norma-norma dan kebiasaan yang lazim berlaku di dunia usaha yang sehat dan kuat dalam tekanan kehidupan ekonomi. Oleh karenanya, pada tanggal 16 Maret 2009, keberadaan Koperasi NU Sejahtera sudah ditingkat Propinsi dengan badan hukum nomor 05/PAD/KDK.11/III/2009.³

Seiring dengan perkembangan pasar dan adanya tuntutan dari warga Nahdliyyin pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka pada tanggal 06 Oktober 2014 mendapatkan pengesahan dari Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia bahwa yang semula bernama Koperasi NU Sejahtera menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera dengan wilayah keanggotaan berkedudukan dan berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia.⁴

Dengan demikian perkembangan kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaannya dilaksanakan secara

³ Dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang di kutip pada tanggal 29 Agustus 2017

⁴ Dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang di kutip pada tanggal 29 Agustus 2017

lebih profesional pun semakin besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggung jawaban yang baik dan informasi yang relevan dan dapat diandalkan guna pengambilan keputusan ekonomi, perencanaan maupun pengendalian koperasi. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting, yang penting, disamping dapat dipergunakan sebagai alat pertanggung jawaban.⁵

2. Tujuan

Adanya beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan RAT KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Tutup Buku Tahun 2015 antara lain:

- a. Media komunikasi (silaturahmi) antara pengurus dan seluruh anggota KSPPS Nusa Ummat Sejahtera.
- b. Melaksanakan amanat kewajiban pengurus untuk menyampaikan laporan hasil tugas dan kinerjanya di depan para anggota.
- c. Media evaluasi dan partisipasi seluruh anggota untuk memajukan KSPPS Nusa Ummat Sejahtera.
- d. Mewujudkan transparansi untuk memperoleh akuntabilitas seluruh anggota.⁶

⁵ Dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang di kutip pada tanggal 29 Agustus 2017

⁶ Dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang di kutip pada tanggal 29 Agustus 2017

3. Ruang Lingkup

Secara garis besar ada tiga ruang lingkup materi yang menjadi kewajiban untuk dilaporkan yaitu:

- a. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Program Kerja.
- b. Hambatan dan Penyelesaian.
- c. Draft Urusan Program Kerja Tahun 2016.⁷

4. Struktur Organisasi

Susunan pengurus dan pengawas KSPPS Nusa Ummat Sejahtera sebagai berikut:

Ketua	: Drs. H. Muhtarom, Akt
Wakil Ketua	: Abdullah, SE
Sekretaris	: H. Anang Budi Utomo, S. Pd., S. Mn., M. Pd
Wakil Sekretaris	: Agustiono, SE
Bendahara	: H. Achmad Kaffi, SE
Pengawas:	
Ketua	: Drs. H. Anasom, M. Hum
Anggota	: Ir. H. Bambang Hanggoro
	Drs. H. Muhdi Zamru, M.Ag. ⁸

5. Produk-Produk KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang

- a. Produk Simpanan

⁷ Dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang di kutip pada tanggal 29 Agustus 2017

⁸ Dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang di kutip pada tanggal 29 Agustus 2017

1) Simpanan Wadi'ah (dengan prinsip Wadi'ah Yad Dhamanah)

Simpanan yang penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Berdasarkan tahun lalu bonus setara dengan 3% tahun.

Syarat dan ketentuan:

- a) Setoran awal Rp. 10.000,-
- b) Pengambilan sewaktu-waktu.
- c) Tidak kena pajak berlaku untuk semua jenis simpanan.⁹

2) Simpanan Pendidikan (dengan prinsip Wadi'ah Yad Dhamanah)

Simpanan yang khusus diperuntukkan bagi siswa sekolah. Bagi hasil setara dengan 4,8%/ tahun.

Syarat dan Ketentuan:

- a) Setoran awal Rp. 10.000,-
- b) Pengambilan sewaktu-waktu.

Simpanan berjangka (SIMKA) Pelunasan Haji (dengan prinsip Mudlarabah) Simpanan bagi calon haji yang sudah mendapatkan porsi untuk pelunasan BPIH.¹⁰

⁹ Dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang di kutip pada tanggal 29 Agustus 2017

¹⁰ Dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang di kutip pada tanggal 29 Agustus 2017

Syarat dan ketentuan:

- a) Setoran minimal Rp. 5.000.000,-
 - b) Nisbah menyesuaikan simka umum.
 - c) Bagi hasil dipergunakan untuk biaya manasik di KBIH, utamanya KBIH NU. Bila sisa lebih dikembalikan kepada calon haji, bisa sisa kurang calon haji dimohon tambahan.
 - d) Proses penyetoran pelunasan dibantu oleh KSPPS NU.
 - e) Syarat-syarat mengisi formulir di lampiri FC, KTP dan BPIH.
 - f) Tidak terkena pinalti jika pengambilan untuk pelunasan.¹¹
- 3) Simpanan Umroh (dengan prinsip Wadiah Yad Dhamanah)

Simpanan yang dipersiapkan untuk menunaikan ibadah umroh. Bonus setara dengan 3%/tahun.

Syarat dan Ketentuan:

- a) Setoran minimal Rp. 100.000,-
- b) Pengambilan setelah cukup untuk biaya umroh.
- c) Fasilitas bagi jumlah berupa Tas Tenteng dan souvenir. Jama'ah bisa mengikuti bimbingan

¹¹ Dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang di kutip pada tanggal 29 Agustus 2017

umroh dengan biro perjalanan maupun termasuk KBIH NU.¹²

- 4) Simpanan Qurban (dengan prinsip Wadiah Yad Dhamanah)

Simpanan sukarela yang dipersiapkan untuk melaksanakan ibadah Qurban. Bonus setara dengan 3%/tahun.

Syarat dan ketentuan:

- a) Setoran awal Rp. 100.000,-.
- b) Pengambilan menjelang Idul Qurban apabila telah cukup untuk membeli hewan qurban yang di rencanakan.¹³

- 5) Simpanan Pensiunan (dengan prinsip Mudlarabah)

Ketentuan:

- a) Atas nama perorangan.
- b) Pembayaran setiap bulan sesuai tanggal akad.
- c) Apabila terjadi keterlambatan maka otomatis dianggap berhenti dan tidak mendapatkan bagi hasil.
- d) Lama jangka waktu 5 dan 10 tahun.
- e) Minimal setoran mulai Rp. 50.000/bulan.

¹² Dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang di kutip pada tanggal 29 Agustus 2017

¹³ Dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang di kutip pada tanggal 29 Agustus 2017

f) Syarat dan ketentuan berlaku.¹⁴

6) Penyertaan Modal atau Saham (dengan prinsip Mudlarabah)

Ketentuan:

- a) Setoran minimal Rp. 1.000.000,- atau kelipatannya
- b) Jangka waktu 1 tahun\
- c) Pengambilan bagi hasil sesudah RAT (Agenda RAT di bulan Januari)
- d) Besaran bagi hasil di tahun sebelumnya setara 24%/tahun, tergantung dari SHU.¹⁵

7) Simpanan Berjangka (dengan prinsip Mudlarabah)

Simpanan yang penyetoran dan penarikannya dilakukan sesuai dengan tempo jangka waktu yang telah ditentukan. Nisbah bagi hasil antara Sohibil Mal dengan Mudhorib = 60:40

- a) Jangka waktu 1 bulan. Bagi hasil setara dengan 0,3%/bulan
- b) Jangka waktu 3 bulan. Bagi hasil setara dengan 0,5%/tahun

¹⁴ Dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang di kutip pada tanggal 29 Agustus 2017

¹⁵ Dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang di kutip pada tanggal 29 Agustus 2017

- c) Jangka waktu 6 bulan. Bagi hasil setara dengan 0,7%/tahun
- d) Jangka waktu 12 bulan, bagi hasil setara dengan 1%/tahun

Syarat dan ketentuan:

- a) Setoran minimal Rp. 1.000.000,- dan atau kelipatannya.
- b) Pengambilan setelah jatuh tempo, apabila di ambil setelah jatuh tempo dikenakan pinalti setara dengan 5%.
- c) Bagi hasil bisa diambil setiap bulan dan dibukakan rekening wadi'ah.¹⁶

8) Simpanan Khusus Berhadiah (SIMSUS Berhadiah)

Simpanan khusus berhadiah langsung (dimuka) dengan nominal tertentu dan jangka waktu 1 tahun.

Simpanan khusus berhadiah ini meliputi:

- a) Simsus berhadiah motor
Dengan menyeter simpanan sebesar Rp. 115.000.000,- jangka waktu 1 tahun, maka mendapat hadiah cash back motor dengan nilai tunai setara Rp. 15.000.000,-.

¹⁶ Dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang di kutip pada tanggal 29 Agustus 2017

b) Simsus berhadiah Umroh

Dengan menyetor simpanan sebesar Rp. 222.000.000,- jangk waktu 1 tahun, maka mendapatkan hadiah cash back Umroh dengan nilai tunai setara Rp. 28.000.000,-.

Syarat dan ketentuan:

- a) Bagi hasil yang diberikan setara 0,1%/bulan (setara 1,2% setahun) yang diberikan pada saat akhir jatuh tempo.
- b) Apabila Pokok Simsus diambil sebelum jatuh tempo, maka anggota harus mengganti nilai tunai seharga dengan barang yang sudah diterima dan membayar denda 1,5% dari Pokok Simsus.¹⁷

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota/calon anggota KSPPS NU Sejahtera berupa modal usaha atau pemberian barang yang diinginkan.

Syarat dan ketentuan:

- a) Mengisi formulir keanggotaan
- b) Mengisi formulir permohonan (Form tersedia)
- c) Foto copy KTP suami dan istri atau wali
- d) Foto copy Kartu Keluarga (KK)

¹⁷ Dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang di kutip pada tanggal 29 Agustus 2017

- e) Foto copy buku nikah
- f) Foto copy jaminan (warkah, BPKB disertai STNK, sertifikat tanah disertai STTP). Bila barang jaminan atas nama orang lain harus dilengkapi surat kuasa dari pemegang hak.
- g) Bila permohonan menggunakan penjamin baik lembaga maupun perorangan harus tertulis dan bermatre cukup
- h) Foto copy legalitas (bagi badan usaha)
- i) Menjadi anggota mitra usaha
- j) Membuka rekening simpanan
- k) Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.¹⁸

2) Musyarakah

Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak KSPPS NU Sejahtera kepada nasabah sebagai patungan modal untuk mengelola usaha, dimana keuntungan maupun resiko yang akan terjadi ditanggung secara bersama-sama menurut perjanjian yang telah disepakati.¹⁹

¹⁸ Dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang di kutip pada tanggal 29 Agustus 2017

¹⁹ Dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang di kutip pada tanggal 29 Agustus 2017

3) Talangan haji (akad *Qord Wal Ijaroh*)

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota/calon anggota KSPPS NU Sejahtera untuk mendapatkan pendaftaran porsi haji Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Syarat dan ketentuan:

- a) Mengisi formulir keanggotaan
- b) Mengisi formulir permohonan (Form tersedia)
- c) Foto copy KTP suami dan istri atau wali
- d) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- e) Foto copy buku nikah
- f) Membuka rekening simpanan
- g) Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan
- h) Jaminan berupa SPPH dan BPIH dari calon jamaah haji terdaftar.²⁰

4) Pembelian Sepeda Motor Baru

Syarat dan ketentuan:

- a) Mengisi formulir keanggotaan
- b) Mengisi formulir permohonan (Form tersedia)
- c) Foto copy KTP suami dan istri atau wali
- d) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- e) Foto copy buku nikah

²⁰ Dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang di kutip pada tanggal 29 Agustus 2017

- f) Membuka rekening simpanan
- g) Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.²¹
- c. Beberapa Layanan Lain:
 - 1. Isi Pulsa All Operator
 - 2. Pembayaran Rekening Listrik Online
 - 3. Pembayaran Rekening Telephone Online
 - 4. Transfer Antar Bank.²²

B. Proses Akad Musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang

Akad Musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang adalah akad kerja sama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian harus ditanggung para mitra karena kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha, maka kerugian ditanggung oleh pengelola dan menjadi piutang KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang.²³

²¹ Dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang di kutip pada tanggal 29 Agustus 2017

²² Dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang di kutip pada tanggal 29 Agustus 2017

²³ Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, kamidun pada tanggal 2 September 2017

Akad Musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian. Akad Musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan..²⁴

Mekanisme Akad Musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dimulai dengan permintaan pembiayaan untuk modal kerja dari nasabah dengan modal kerja total. Jika menemukan kasus ini, maka KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang akan menggunakan musyarakah dengan menetapkan nisbah atau prosentase bagi hasil. Misalnya nasabah adalah pedagang jeruk yang membutuhkan modal. Sebelum KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang membiayai nasabah, terlebih dahulu KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang harus mengetahui bagaimana kondisi penjualannya di pasar. Yang kemudian dilakukan adalah mencari berapa besar omsetnya, berapa pembiayaan yang dibutuhkan, dan KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang akan mendapatkan laba berapa sebagai hasil dari kerjasama yang nanti akan dilakukan oleh kedua belah pihak..²⁵

²⁴ Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, kamidun pada tanggal 2 September 2017

²⁵ Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, kamidun pada tanggal 2 September 2017

Setelah diketahui semua, pada nantinya bisa dihitung berapa nisbah untuk nasabah dan berapa untuk KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang. Perhitungan itu bisa diketahui dengan cara, laba yang diinginkan dibagi omzet, maka hasilnya adalah nisbah dalam 1 bulan. Nisbat itu kemudian dikalikan dengan realisasi pendapatan. Jadi realisasi pendapatan didasarkan atas penjualan real tiap bulannya. Dalam pembiayaan musyarakah, didalamnya terdapat proyeksi pendapatan, yaitu perkiraan pendapatan KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang. Karena dalam musyarakah terdapat proyeksi dan realisasi. Untuk menentukan bagi hasil, mengamati realisasi dan proyeksi itu sangat penting. Dalam praktek di lapangan, KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang juga melakukan analisa dari segala sisi, kemudian akan dibuatkan SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan). Setelah SP3 sudah keluar dan ditandatangani oleh nasabah, maka KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang akan order ke notaris untuk akad pembiayaan.²⁶

Tahapan selanjutnya adalah perjanjian melaksanakan akad. Setelah akad dilaksanakan, KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang akan memberikan dana pada nasabah. Kemudian nasabah mengangsur di setiap bulannya. Selain itu, nasabah memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil penjualan atau usahanya. Lalu dibuatkan berita acara penghitungan bagi hasil yang

²⁶ Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, kamidun pada tanggal 2 September 2017

ditandatangani oleh KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dengan nasabah. Setelah nasabah bersedia, KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang akan mendebet dari marketing ke admin pembiayaan untuk mendebet bagi hasil tersebut.²⁷

KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang melandaskan pembiayaan musyarakah berdasarkan prinsip musyarakah dan pembiayaan ada tiga prinsip yaitu, prinsip bagi hasil (musyarakah dan musyarakah), prinsip jual beli (salam dan sitishna), dan prinsip sewa (ijarah dan ijarah muntahiya bitamlik).²⁸

Akad Al Musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang meliputi:

1. Tambahan Modal Usaha (TAMU)

Pembiayaan untuk menunjang kegiatan usaha yang sudah berjalan agar dapat menjadi lebih baik dan maju. Akad yang digunakan adalah musyarakah (syirkah) dengan pola bagi hasil yang skemanya ditentukan secara bersama-sama. Mudharib atau pihak yang dapat dibiayai oleh KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang adalah:

²⁷ Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, kamidun pada tanggal 2 September 2017

²⁸ Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, kamidun pada tanggal 2 September 2017

- a. Investasi dan modal kerja untuk amal usaha yang banyak dibiayai secara ekonomis.
- b. Pembiayaan produktif untuk pengusaha kecil, pedagang kaki Lima dan usaha mikro yang produktif lainnya.
- c. Pembiayaan investasi atau konsumtif bagi golongan berpenghasilan tetap baik pegawai muhammadiyah, PNS, dan pegawai swasta lainnya.
- d. Nasabah secara umum yang layak dibiayai secara ekonomis.

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada pengusaha untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisa terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Prioritas Alokasi Pembiayaan untuk modal kerja 50% dengan jangka waktu 12-18 bulan, investasi 25% dengan jangka waktu 12-24 bulan dan konsumtif 25% dengan jangka waktu 12-30 bulan.²⁹

Adapun kebijakan pembiayaan musyarokah yang menjadi ketentuan di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang adalah:

²⁹ Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 2 September 2017

- a. Pembiayaan diperuntukkan bagi mitra yang memenuhi persyaratan:
 - 1) Beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani
 - 2) Memiliki rekening tabungan
 - 3) Memiliki usaha/pekerjaan yang halal dan alokasi jelas, tidak dibenarkan untuk usaha yang baru atau akan berjalan.
- b. Pengajuan untuk mitra dilakukan secara langsung atas nama suami, kecuali janda/ditinggal merantau, maka harus dilengkapi surat keterangan dari instansi pemerintah setempat.
- c. Harus melengkapi persyaratan yang ditentukan KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang meliputi:
 - 1) FC KTP pemohon/suami istri (bagi pemohon yang sudah menikah) dan FC KTP orang tua bagi yang belum menikah.
 - 2) FC kartu keluarga
 - 3) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- d. Pembiayaan sama dengan atau lebih dari Rp500,000,- harus disertai dengan jaminan.
- e. harus melalui prosedur standar (pengajuan permohonan pembiayaan, survei, analisis, rapat komite) dan KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang berhak menolak

pengajuan pembiayaan yang tidak memenuhi prosedur standar.

- f. Jangka waktu pembiayaan maksimal 2 tahun untuk angsuran bulanan dan 3 tahun untuk angsuran jatuh tempo.
- g. Apabila mitra meninggal dunia, maka tanggung jawab pembiayaan akan beralih kepada ahli waris.³⁰

Ketentuan-Ketentuan Pembiayaan Musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang

1. Ijab dan qobul harus dinyatakan dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c. Akad dituangkan secara tertulis.
2. Pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum
 - a. Kompeten, serta menyediakan dana dan pekerjaan
 - b. Memiliki hak mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal

³⁰ Wawancara dengan Luluk Farida karyawan KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 9 September 2017 dan dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang yang di kutip pada tanggal 9 September 2017

- c. Memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dengan memperhatikan kepentingan mitranya
 - d. Tidak diijinkan mencairkan / menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.³¹
3. Obyek akad
- a. Modal
 - 1) Modal dapat berupa uang tunai / aset bisnis. Jika modal berbentuk aset, terlebih dahulu harus dinilai dengan tunai dan disepakati oleh semua pihak
 - 2) Modal tidak boleh dipinjamkan / dihadiahkan kepada pihak lain - Pada prinsipnya tidak ada jaminan. Namun untuk menghindari penyimpangan, lembaga keuangan syari'ah dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat. Seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih dari mitra yang lain, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya

³¹ Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 2 September 2017 dan dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang yang di kutip pada tanggal 9 September 2017

- 2) Setiap mitra melaksanakan pekerjaan atas nama pribadi dan wakil dari mitranya, kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus diquantifikasikan
- 2) Dibagikan secara proporsional atas dasar keuntungan, dan tidak ada jumlah yang ditetapkan diawal
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan, bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atas prosentase itu diberikan kepadanya
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus jelas tertuang dan sesuai dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus ditanggung para mitra karena kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha, maka kerugian ditanggung oleh pengelola dan menjadi piutang KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang.³²

Sedangkan tahap proses pembiayaan musyarokah KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang antara lain:

³² Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 2 September 2017 dan dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang yang di kutip pada tanggal 9 September 2017

1. Tahap Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses untuk menentukan target bisnis yang ingin direalisasikan pada tahun / bulan berjalan. Dalam proses ini KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang akan mendapatkan informasi / input mengenai kondisi, potensi dan trend usaha yang sedang marak / berkembang. Sehingga KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang akan dengan mudah mengetahui perusahaan / perorangan mana yang layak dibiayai dan yang tidak layak dibiayai. Dalam tahap ini pihak yang terkait adalah marketing officer, manajer pemasaran dan pimpinan.³³

2. Tahap Permohonan Pembiayaan

Dalam tahap permohonan ini nasabah mengajukan proposal pembiayaan dan lampiran tentang syarat-syarat pembiayaan yang harus dipenuhi pada marketing officer. Kemudian dari marketing officer diserahkan kepada manajer pemasaran dan pimpinan cabang, apabila tidak disetujui maka marketing officer membuat surat penolakan, dan apabila disetujui maka marketing officer melakukan tahap selanjutnya yaitu tahap investigasi.³⁴

3. Tahap Investigasi

³³ Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 16 September 2017

³⁴ Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 16 September 2017

Tahap ini berfungsi untuk meneliti kelayakan calon nasabah, serta meneliti dan mencocokkan mengenai kebenaran dokumen dan data-data yang diserahkan nasabah. Dalam tahap ini dilakukan pula On The Spot atau kegiatan pemeriksaan kelapangan untuk meninjau kebenaran usaha dan jaminan. Apabila telah sesuai maka marketing officer membuat rangkuman hasil pelaksanaan investigasi dan kesimpulan hasil pengecekan.

Proses pencairan pembiayaan ini melibatkan marketing dan analis officer, manajer pemasaran, manajer operasi, administrasi pembiayaan, customer service dan pimpinan cabang. Akad pembiayaan akan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pembiayaan. Saat akad juga terjadi pengikatan jaminan.³⁵

4. Tahap Monitoring

Yang dimaksud pada tahap ini adalah KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang ikut memonitor aktivitas usaha nasabah, serta ikut memantau daftar angsuran jatuh tempo serta pemberitahuan akan jatuh tempo selama masa pembiayaan itu berlangsung.³⁶

³⁵ Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 16 September 2017

³⁶ Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 16 September 2017

Adapun formulir yang digunakan dalam proses penyaluran pembiayaan musyarokah KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang adalah :

1. Surat Permohonan Pembiayaan (SPP), berisi aplikasi permohonan pembiayaan nasabah beserta rincian serta agunan yang disertakan.
2. Surat Pernyataan Agunan (SPA), berupa pernyataan tertulis dari nasabah bahwa agunan yang disertakan benar-benar milik nasabah.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan SPP (LHP), berisi rincian identitas nasabah, karakter, estimasi kondisi usaha, agunan nasabah, tujuan penggunaan pembiayaan, modal dan usulan pembiayaan. Bagian akhir laporan ini merupakan hasil analisis bagian pembiayaan.
4. Lembar Persetujuan Pembiayaan (LPP), berisi pernyataan dari direksi bahwa permohonan pembiayaan nasabah disetujui dan dapat direalisasikan.
5. Akad Pembiayaan (AP), berisi pernyataan bahwa kedua belah pihak, yaitu KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dengan nasabah, melakukan perjanjian pembiayaan tertentu dan dilengkapi dengan rincian pembiayaan yang dibutuhkan.
6. Surat Pengakuan Menerima Pembiayaan (SPMP), berisi pernyataan dari nasabah bahwa ia telah menerima pembiayaan jenis tertentu dari KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang.

Sejumlah tertentu, dan akan diangsur sebanyak sejumlah tertentu angsuran.

7. Slip Setoran (SST), berisi jenis setoran tertentu dari nasabah.
8. Kwitansi Realisasi Pembiayaan (KRP), berisi nilai pembiayaan dan dilengkapi dengan nomor rekening tabungan nasabah dan nomor akad pembiayaan.
9. Kartu Pembayaran Angsuran (KPA), merinci besarnya angsuran, total angsuran, dan saldo pinjaman nasabah. Kartu ini menjadi bukti angsuran yang dipegang dari nasabah.
10. Kartu Pembiayaan (KP), merinci pokok dan margin angsuran, pokok dan margin sisa angsuran, total sisa angsuran, sampai jumlah tunggakan apabila nasabah tidak mengangsur pada saat jatuh tempo. Kartu ini menjadi bukti angsuran yang disimpan oleh pihak KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang.³⁷

Dalam mengajukan pembiayaan musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang tidak lepas dari prosedur sebagai berikut :

1. Nasabah melengkapi Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) yang didapat dari customer service, melampirkan identitas diri dan Surat Pernyataan Agunan (SPA). Agunan dapat

³⁷ Wawancara dengan Suwarni karyawan KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 9 September 2017 dan dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang yang di kutip pada tanggal 9 September 2017

berupa BPKB, Sertifikat Tanah, atau dokumen berharga lainnya yang disetujui KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang.

2. Petugas administrasi pembiayaan mencatat dan memberi nomor register pada SPP yang masuk. Setelah itu, SPP diajukan pada pejabat berwenang untuk mendapatkan disposisi.
3. Kemudian bagian pembiayaan mensurvei ke lokasi usaha nasabah. Melakukan wawancara dengan nasabah, mencocokkan data pada SPP dengan kondisi yang sesungguhnya, memeriksa kelengkapan pembukuan, SIUP, NPWP, atau tanda Daftar Perusahaan, dan dokumen lain yang dibutuhkan. Hasil survey selanjutnya direkam dalam Laporan Hasil pemeriksaan SPP untuk dianalisis dan diteruskan kepada Direksi.
4. Pihak Direksi selanjutnya mempertimbangkan hasil analisis pembiayaan dan memutuskan apakah pembiayaan disetujui untuk direalisasikan atau tidak.
5. Untuk Pembiayaan yang disetujui, bagian pembiayaan kemudian mempersiapkan Akad Pembiayaan (AP) dan berbagai dokumen yang dibutuhkan yaitu Slip Setoran (SSt), Surat Pernyataan Menerima Pembiayaan (SPMP), kwitansi Realisasi Pembiayaan (KRP), Kartu Pembayaran Angsuran (KPA), dan Kartu Pembiayaan (KP). SPA diteruskan kepada notaris untuk diperiksa keabsahan dan kebenarannya.

6. Apabila hasil survey menunjukkan bahwa Pembiayaan tidak layak sehingga tidak dapat terealisasi, maka bagian pembiayaan akan melakukan survey ulang kepada nasabah. Dalam hal ini, nasabah dapat mengganti agunan apabila agunan nasabah tidak disetujui.
7. Setelah semua dokumen yang diperlukan siap, pihak KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang menandatangani akad bersama di hadapan notaris. Selanjutnya AP, SSt, SPMP, KRP, dan KPA diarsipkan oleh bagian pembiayaan.
8. Dokumen yang lain, SPMP, SSt, dan KRP diteruskan ke bagian kassa untuk pencairan dana pembiayaan.
9. Bagian kassa menyerahkan uang tunai dan seluruh dokumen 2 lembar kepada nasabah.
10. SPMP, SST, dan KRP kemudian diteruskan ke bagian akuntansi untuk dicatat dan diarsipkan.
11. Nasabah wajib mengasuransikan jiwa sebesar pembiayaan yang diperoleh dari KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang.
12. Semua biaya yang timbul atas proses pembiayaan dibayar tunai di muka oleh nasabah.
13. Surat bukti (asli) kepemilikan jaminan seperti SHM, SHGB, BPKB, surat kios dan lain-lain disimpan KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang sampai pembiayaan dilunasi.

14. Selama masa pembiayaan, nasabah tidak diperkenankan menerima pembiayaan dari pihak manapun tanpa sepengetahuan KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang.³⁸
15. Memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan bermanfaat dan maslahat bagi kedua belah pihak. Yaitu bagi nasabah dan bagi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dan memberikan gambaran positif tentang 5 aspek yang diteliti (5 C + S) bernilai positif yaitu:
 - a. *Character*, yaitu watak atau sifat dan kepribadian pemohon. Penilaian terhadap aspek ini dilakukan antara lain dengan cara meneliti riwayat hidup, reputasi, informasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dan hasil pengecekan pasar.
 - b. *Capital*, yaitu kemampuan pemohon untuk menyediakan modal/kemampuan keuangan calon secara umum
 - c. *Capacity*, yaitu kemampuan calon nasabah untuk mengelola usahanya.
 - d. *Condition*, yaitu situasi sosial ekonomi, politik dan budaya yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu dan mempengaruhi

³⁸ Wawancara dengan Suwarni karyawan KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 9 September 2017 dan dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang yang di kutip pada tanggal 9 September 2017

kegiatan usaha (produksi, pemasaran dan keuangan) nasabah.

- e. *Collateral*, yaitu penilaian atas jaminan yang dapat diberikan oleh nasabah, baik menyangkut aspek ekonomis maupun aspek yuridis.
 - f. Syari'ah, yaitu penilaian kesesuaian dan penerapan prinsip syari'ah.³⁹
16. Dengan melampirkan laporan hasil investigasi dan hasil analisis yuridis, *account officer* menyampaikan kepada komite pembiayaan melalui bagian administrasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Nomor dan tanggal hasil analisis penyaluran dana
 - b. Penjelasan singkat tentang nasabah/perusahaan nasabah dan permasalahan yang dihadapi
 - c. Kebutuhan pembiayaan dan tujuan penggunaannya
 - d. Aspek yuridis, merupakan aspek untuk menilai keabsahan keaslian dokumen-dokumen/surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, misalnya akta notaris, izin usaha, NPWP dan dokumen lainnya.
 - e. Aspek manajemen, merupakan aspek untuk menilai SDM yang dimiliki oleh perusahaan, baik kuantitas maupun kualitas.

³⁹ Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 16 September 2017

- f. Aspek teknis produksi, merupakan aspek untuk menilai lokal usaha, tata letak ruang dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimiliki serta kemudahan dalam pengadaan logistik.
- g. Aspek pemasaran, merupakan aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang.
- h. Aspek keuangan, merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon debitur dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya yang akan dikeluarkan dan pendapatan yang akan diperolehnya. Penilaian aspek-aspek ini dengan menggunakan rasio keuangan.
- i. Aspek jaminan, untuk mengetahui apakah jaminan tersebut bisa *mengcover* pembiayaan yang diajukan oleh nasabah atau tidak.
- j. Aspek sosial ekonomis, merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan karena adanya suatu usaha tertentu terutama terhadap masyarakat sekitarnya.
- k. ASPEK AMDAL, merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu kegiatan usaha tertentu. Kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

- l. Skema penyaluran dana
 - m. Rekomendasi.⁴⁰
17. Realisasi pembiayaan, merupakan persetujuan KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang atas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. Langkah-langkah dari proses realisasi pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut :
- a. Nasabah menerima slip pencairan pembiayaan
 - b. Teller mempersilahkan debitur untuk menandatangani slip pembayaran administrasi.
 - c. Teller meminta nasabah untuk membayar biaya administrasi pembiayaan dan biaya lainnya yang tertera dalam slip pencairan pembiayaan.
 - d. Teller membukukan transaksi pembayaran biaya administrasi dan transaksi realisasi pembiayaan.
 - e. Teller menyiapkan uang sesuai dengan pengajuan pembiayaan yang di inginkan nasabah.⁴¹

Dalam akad/perjanjian disebutkan jumlah dan jenis pembiayaan, jangka waktu dan cara pelunasan pembiayaan, biaya administrasi, nisbah bagi hasil, jaminan, kelalaian kewajiban, pengawasan pembiayaan, domisili hukum, penutup

⁴⁰ Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 16 September 2017

⁴¹ Wawancara dengan Suwarni karyawan KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 9 September 2017

yang berisi "segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam surat-surat perjanjian lain dan merupakan bagian yang melekat dan tak terpisahkan serta dilampirkan pada perjanjian ini", kemudian disertakan tandatangan dari Direksi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, nasabah/pemohon dan saksi-saksi.⁴²

Biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang adalah:

1. Biaya Administrasi yaitu tergantung pada plafon dan jauh dekatnya lokasi calon nasabah, berkas-berkas yang disiapkan dan mensurvei lapangan. Biaya administrasi ditentukan pada saat akad pembiayaan berlangsung.
2. Biaya Notaris
3. Biaya Materai
4. Biaya lain-lain.⁴³

Berdasarkan perjanjian pembiayaan musyarakah, nasabah akan mengembalikan pembiayaan selama jangka waktu yang telah disepakati/ditentukan oleh kedua pihak dengan permintaan nasabah. Nasabah mengembalikan sepenuhnya pokok pembiayaan tersebut kepada KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang pada

⁴² Wawancara dengan Suwarni karyawan KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 9 September 2017

⁴³ Wawancara dengan Suwarni karyawan KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 9 September 2017

saat jatuh tempo dan membayar bagi hasil secara angsuran setiap bulannya dengan tertib dan teratur sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan perjanjian pembiayaan musyarakah, nasabah akan mengembalikan pembiayaan selama jangka waktu yang telah disepakati/ditentukan oleh kedua pihak dengan permintaan nasabah.⁴⁴

Nasabah mengembalikan sepenuhnya pokok pembiayaan tersebut kepada KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang pada saat jatuh tempo dan membayar bagi hasil secara angsuran setiap bulannya dengan tertib dan teratur sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁴⁵

Dalam pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, maka nasabah harus bersedia untuk setiap waktu diperlukan oleh KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang guna memberikan keterangan kepada KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang atas keadaan barang dagangan dan modal lainnya. Untuk mendapatkan informasi yang benar dari hasil perkembangan usaha nasabah, maka nasabah berkewajiban menyampaikan laporan keuangan dan atau *cash in flow* usaha nasabah setiap bulan kepada KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang secara benar dan ditandatangani

⁴⁴ Wawancara dengan Suwarni karyawan KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 9 September 2017

⁴⁵ Wawancara dengan Robani, konsumen KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 16 September 2017

oleh nasabah. Untuk pemantauan secara rutin KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang setiap satu minggu sekali atau sesuai dengan jadwal pemantauan. KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang memantau perkembangan usaha untuk melihat kesesuaian jadwal usaha dengan keadaan sebenarnya.⁴⁶

C. Praktik Pembagian Laba Rugi dalam Akad Musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang

Proses pembagian bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dengan skema bagi hasilnya ditentukan secara bersama-sama dengan jalan bernegosiasi dalam hal berbagi keuntungan, dan kerugian akan ditanggung secara bersama-sama berdasarkan porsi modal masing-masing.⁴⁷

Keuntungan dari musyarakah bagi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang adalah pendapatan yang tidak terbatas. Artinya ketika omsetnya naik, maka pendapatan KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang juga naik. Tetapi KSPPS punya kebijakan agar nasabah tidak berat saat omsetnya naik yakni KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang mengambil inisiatif dengan mengambil sebesar bagi hasil. Untuk bagi hasil, pembiayaan adalah sebesar proyeksinya kemudian kelebihan

⁴⁶ Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 16 September 2017

⁴⁷ Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 16 September 2017

dibagi dua. Tentunya musyarakah lebih rumit karena memerlukan tenaga ekstra. Tetapi lebih mudah dan menguntungkan bagi nasabah.⁴⁸

Prinsip bagi hasil dalam akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang antara lain:

1. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi
2. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
4. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil
5. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan yang telah dihitung dan disepakati bersama di awal akad.⁴⁹

Metode Perhitungan bagi hasil di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang adalah sebagai berikut:

1. Hitung *expected revenue* KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang

⁴⁸ Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 16 September 2017

⁴⁹ Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 16 September 2017

2. Hitung nisbah KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dengan membandingkan *expected revenue* dengan proyeksi *sales*.
3. Hitung nisbah nasabah (100% - nisbah KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang).⁵⁰

Seperti pada kasus PT Anugerah adalah perusahaan pengembang perumahan di daerah kaliwungu. Pada tahun 2017 mengerjakan proyek pengembangan perumahan sebesar 3 M. Dari nilai tersebut pembayaran dilakukan dalam 3 tahap. I 20%, II 15%, III 30%. Untuk mengerjakan proyek tersebut PT Anugerah mengajukan pembiayaan ke KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang sebesar 1 M, *return* yang diharapkan KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang sebesar 15 % efektif, dengan catatan pokok 1 M akan dibayar setelah pembayaran 30%, berapa nisbah setiap bulan?.⁵¹

Tahap I

$$15\% \times 1 \text{ M} = \text{Rp } 150.000.000/12 = \text{Rp } 12.500.000$$

$$\text{Bulan I: omset } 20\% \times 3 \text{ M} = \text{Rp } 600.000.000$$

$$\text{Nisbah} = \frac{12.500.000}{600.000.000} \times 100\% = 2,08 \%$$

⁵⁰ Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 16 September 2017

⁵¹ Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 16 September 2017 dan dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang yang di kutip pada tanggal 16 September 2017

Jadi nisbah untuk KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang = 2,08%

Nisbah untuk nasabah = $100\% - 2,08\% = 97,92\%$

Realisasi bagi hasil untuk KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang $2,08\% \times \text{Rp } 600.000.000 = \text{Rp } 12.480.000$

Bagi hasil untuk nasabah $97,92\% \times \text{Rp } 600.000.000 = \text{Rp } 587.520.000$

Bulan II: omset $15\% \times 3 \text{ M} = \text{Rp } 450.000.000$

$$\text{Nisbah} = \frac{12.500.000}{450.000.000} \times 100\% = 2,78\%$$

Jadi nisbah untuk KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang = 2,78 %

Nisbah untuk nasabah = $100\% - 2,78\% = 97,22\%$

Realisasi bagi untuk KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang $2,78\% \times \text{Rp } 450.000.000 = \text{Rp } 12.510.000$

Bagi hasil untuk nasabah $97,22\% \times \text{Rp } 450.000.000 = \text{Rp } 437.490.000$

Bulan III: omset $30\% \times 3 \text{ M} = \text{Rp } 900.000.000$

$$\text{Nisbah} = \frac{12.500.000}{900.000.000} \times 100\% = 1,39$$

Jadi nisbah untuk KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang = 1,39 %

Nisbah untuk nasabah = $100\% - 1,39\% = 98,61\%$

Realisasi bagi hasil untuk KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang $1,39\% \times \text{Rp } 900 \text{ juta} = 12.510.000$

Bagi hasil untuk nasabah $98,61\% \times \text{Rp } 900 \text{ juta} = 887.490.000$

Kasus lain Seorang nasabah (Ibu Siti Juma'iyah) mengajukan pembiayaan musyarakah sebesar Rp. 2.000.000,00 untuk menambah modal, mengingat bulan juni-juli merupakan persiapan memasuki tahun ajaran baru bagi pelajar, ia berkeinginan untuk membeli buku-buku sekolah sebagai modal usahanya. Oleh KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang pembiayaan tersebut disetujui dengan ketentuan nisbah bagi hasilnya 25%:75%. Dalam mengangsur pinjaman, Ibu Siti Juma'iyah memilih sistem bulanan. Maka penghitungan bagi hasil dan angsurannya adalah sebagai berikut :⁵²

Pendapatan

Omzet 1 s.d. 28 Februari 2017	Rp. 2.848.650,00
-------------------------------	------------------

Biaya-biaya

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pengadaan Barang | Rp. 115.000,00 |
| 2. Biaya Angsuran KSPPS NU | Rp. 292.700,00 |
| 3. Biaya Konsinyasi Barang | Rp. 1.220.025,00 |

⁵² Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 16 September 2017 dan dokumentasi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang yang di kutip pada tanggal 16 September 2017

4. Biaya Tenaga Kerja		
Gaji Bulanan	Rp. 210.000,00	
Makan Siang	Rp. 60.000,00+	
	Rp. 270.000,00	
5. Biaya Sewa Toko (1/4. Rp. 10.000.000,00)		Rp. 208.000,00
6. Biaya Telfon (1/4. Rp. 120.000,00)	Rp. 30.000,00	
7. Infak	Rp. 60.000,00	
8. Biaya Pemeliharaan		
Sampah	Rp. 10.000,00	
Plastik	Rp. 4.800,00	
Rental	Rp. 1.900,00	
Foto kopi Double Tip	Rp. 2.800,00+	
	Rp. 19.000,00	
9. Biaya Bagi Hasil Bazaar		
Bazaar Buku	Rp. 7.000,00	
Bazaar KKN	Rp. 21.000,00+	
	Rp. 28.000,00	
Total Biaya	Rp. 2.243.225,00-	
Laba Per Februari 2017	Rp. 605.425,00	

Bagi Hasil KSPPS NU Sejahteran

25 % (selisih Januari) + (selisih Februari)

25 % (Rp. 170.790,00) + (Rp. 605.425,00 – Rp. 601.865,00)

25 % (Rp. 170.790,00) + (Rp.3.560)

25 % (Rp. 174.350,00

Rp. 43.588,00

Rp. 43.600,00

Cicilan Februari 2017

Rp. 250.000,00 + Rp. 43.600,00

Rp. 293.600,00

Oleh karena itu, setiap bulan Ibu Siti Juma'iyah membayar angsuran sebesar Rp. 293.600,00

Sistem bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Bagi nasabah yang memilih menggunakan akad musyarakah dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Namun dikala usaha yang dijalankan nasabah macet, maka langkah awal yang diambil oleh KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang adalah memberikan pembinaan-pembinaan kepada usaha tersebut.⁵³

⁵³ Wawancara dengan Sakdullah, Manajer KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 16 September 2017 dan wawancara dengan Eram Setiowati, konsumen KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, pada tanggal 23 September 2017

BAB IV
ANALISIS PEMBAGIAN LABA RUGI DAN ANALISIS
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
PEMBAGIAN LABA RUGI DALAM AKAD MUSYARAKAH DI
KSPPS NU SEJAHTERA MANGKANG SEMARANG

A. Analisis Pembagian Laba Rugi di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang

Kemitraan usaha dan pembagian hasil telah dipraktekkan sejak jaman Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya akan tetapi tidak ditemukan adanya ketentuan serta rincian tentang perjanjian ini. Penjelasan-penjelasan yang terperinci diberikan oleh para fuqaha, sebagaimana yang telah diberikan sebelumnya, berdasarkan prinsip-prinsip yang diperoleh dari Al-Qur'an dan sunnah tentang metode-metode perjanjian usaha yang lazim dipergunakan dalam syirkah pada masa masyarakat Islam terdahulu.

Metode-metode ini digunakan untuk kesejahteraan manusia, karena sering terjadi seseorang yang memiliki modal tapi tidak mampu menjalankan usaha, atau sebaliknya memiliki keinginan untuk berusaha tapi tidak ada modal yang dapat digunakan. Melalui sistem musyarakah kedua pihak ini memungkinkan untuk mencapai tujuan bersama dengan jalan kerjasama. Demikian pula hal ini memungkinkan apabila ada dua orang yang memiliki modal, daripada melakukan usaha sendiri

akan lebih efektif dan menguntungkan apabila bergabung dan bekerjasama.

Dalam praktik perbankan syari'ah belum tentu seluruhnya menggunakan sistem bagi hasil, karena selain sistem bagi hasil masih ada sistem jual beli dan sewa-menyewa yang juga digunakan dalam sistem operasi bank syari'ah. Sehingga bank syari'ah mempunyai ruang gerak yang lebih luas dari sistem bagi hasil dan diharapkan dengan penerapan praktik bank syari'ah dapat lebih fleksibel sesuai dengan kontek, kebutuhan, dan keadaan spesifik yang dihadapi di lapangan.¹

Mekanisme bagi hasil saat ini telah menjadi metode unggulan bagi perbankan syari'ah, namun dipertegas lagi bahwa posisi syari'ah yang juga berbasis pada prinsip kebebasan berkontrak adalah fleksibel. Semua jenis kontrak transaksi pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang dalam (hal transaksi keuangan) tidak berisi elemen riba atau *gharar*, meskipun masih ada perbedaan mengenai definisi riba namun telah ada konsensus diantara para ulama bahwa operasi perbankan syari'ah harus berdasarkan bebas bunga. *Gharar* dapat didefinisikan sebagai suatu situasi di mana para pihak tidak menunjukkan penguasaan

¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 192

terhadap komoditas yang ditransaksikan. Apalagi tanpa penyerahan barang adalah tidak sah.²

Dalam diri KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang nampaknya telah terbebas dari *gharar*. Karena pada KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil dalam perhitungan transaksi keuangan serta memberikan margin dalam sistem jual beli dan sewa-menyewa

Pembagian laba antar mitra dalam akad pembiayaan musyarakah yang diterapkan di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang harus berupa persentase, bukan suatu jumlah tertentu. Menurut kalangan Mazhab Hanafi dan Hambali, persentase tersebut harus ditentukan secara jelas dalam kontrak. Menentukan suatu jumlah tetap bagi seorang mitra tidak diperbolehkan lantaran total laba yang akan diperoleh barangkali tidak akan melebihi jumlah yang telah ditetapkan, dalam kasus seperti itu mitra lainnya bisa tidak memperoleh bagian dari laba tersebut. Bagi kalangan Mazhab Syafi'i, tidak ada keperluan untuk menetapkan bagian laba dalam kontrak, sebab mereka tidak memperbolehkan adanya perbedaan antara rasio saham dalam modal dengan rasio laba. Menurut faqih Mazhab Syafi'i, Nawawi (w. 676/1277), "proporsi laba dan rugi harus sama dengan proporsi modal yang

² Zaenul arifin, *Memahami Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvaber, 1999, h.

diberikan, baik tenaga yang disediakan oleh para mitra setara ataupun tidak.³

Sementara kalangan Mazhab Syafi'i tidak mengizinkan perbedaan rasio pembagian laba dengan rasio kontribusi modal, terdapat fleksibilitas yang berarti dalam menetapkan rasio itu menurut Mazhab Hanafi dan Hambali. Para mitra dapat berbagi laba secara setara ataupun tidak. Seorang mitra yang menyumbangkan sepertiga dari modal musyarakah, misalnya, dapat memperoleh separoh atau lebih dari laba. Menurut faqih Mazhab Hanafi, Kasyani (w. 587/1191), “tidaklah harus bahwa didalam *inan* (salah satu jenis musyarakah), laba harus dibagi setara antar para mitra. Oleh sebab itu, diperbolehkan untuk membagi laba secara setara atau tidak. Prinsipnya adalah bahwa si mitra mendapatkan laba baik karena pemberian modal berupa uang atau tenaga kerja, atau berupa tanggungjawab.”⁴

Tidak ada fleksibilitas yang muncul dalam musyarakah menyangkut pembagian rugi *vis a vis* rasio kontribusi modal. Menurut keempat mazhab fiqih sunni, seperti yang dicerminkan dalam ungkapan hukum, “pembagian rugi harus persis sama dengan rasio kontribusi modal. Menurut Jaziri, jika salah satu mitra menentukan bahwa yang lain harus menanggung resiko melebihi rasio kontribusi modal, maka kontrak ini batal dan tidak berlaku. Prinsip berikut menurut riwayat yang dinyatakan oleh

³ Zaenul arifin, *Memahami Bank Syari'ah*, h. 92

⁴ Zaenul arifin, *Memahami Bank Syari'ah*, h. 92

khalifah keempat Ali B. Abi Thalib (w. 40/660), “laba harus dibagi sebagaimana yang disepakati dalam kontrak, sementara kerugian harus dibagi sesuai kontribusi modal.”⁵

Bagi hasil (*profit sharing*) merupakan sistem yang berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia dan bukan bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi semata, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan.⁶ Sistem bagi hasil biasa diterapkan di KSPPS atau lembaga-lembaga keuangan syari’ah lainnya karena prinsip bagi hasil selaras dengan syari’at Islam yang melarang adanya praktek *riba* dalam menjalankan suatu usaha, Dan sistem bagi hasil merupakan sistem yang terbebas dari unsur-unsur *riba*.

Sistem bagi hasil lebih memperhatikan nilai-nilai sosial, hal ini terlihat pada definisi bagi hasil berikut. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil dari hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini bisa terjadi antara lembaga keuangan dengan penyimpan dana, maupun lembaga keuangan dengan nasabah penyimpan dana. Bentuk produk yang berdasarkan pada prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah.⁷ Sistem ini bisa

⁵ Zaenul arifin, *Memahami Bank Syari’ah*, h. 92

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 11

⁷ Muhamad ed, *Bank Syari’ah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003, h. 18

dilakukan pada suatu kerja sama antara kedua pihak atau lebih dengan cara melakukan kesepakatan tentang besar kecilnya prosentase (*nisbah*) yang akan di peroleh sesuai dengan akad yang dilakukan kedua belah pihak, *nisbah* dihitung dari keuntungan yang diperoleh, dan bila terjadi kerugian maka ditanggung kedua belah pihak.⁸

Prinsip bagi hasil (*syirkah*) dipergunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dana pada bank syari'ah. Demikian pula halnya Bank Syari'ah Mandiri Semarang yang menerapkan prinsip ini kedalam salah satu produk pembiayaanya, yaitu pembiayaan *musyarakah*. Alasan mendasar Bank Syari'ah Mandiri Semarang menerapkan prinsip bagi hasil musyarakah ini, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Shad ayat 24 yaitu :

...وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ... (ص: ٢٤)

Artinya: "...dan sesungguhnya kebanyakan dari arang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh..." (QS. Shad : 24)⁹

⁸ Muhamad *ed*, *Bank Syari'ah*, h. 58.

⁹ Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 735-736

Sebuah musyarakah tentu tidak terlepas dari rentetan proses dalam mendapatkan keuntungan yang di dalamnya terdapat berbagai beban biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang bekerjasama. Syari'at Islam, dengan berpedoman pada pendapat para tokoh (ulama) fiqh, memang tidak menerangkan tentang pembagian beban kerugian sebagai salah satu syarat sahnya sebuah musyarakah. Akan tetapi keberadaan pembagian keuntungan yang menjadi salah satu syarat sah musyarakah dapat dijadikan sebagai indikasi bahwasanya adanya pembagian keuntungan juga harus diiringi dengan pembagian beban tanggungan pembiayaan. Keuntungan tidak akan pernah dicapai tanpa adanya proses yang membutuhkan pembiayaan.

Lebih lanjut, Islam menjelaskan bahwa pembagian besar keuntungan maupun beban biaya usaha ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak pada saat persetujuan dan harus tercantum dalam perjanjian (akad). Penentuan batasan keuntungan dan beban biaya atau yang disebut juga dengan istilah nisbah harus berdasar pada prinsip untuk tidak saling merugikan di antara pihak-pihak yang bekerjasama.

Berkaitan dengan batasan keuntungan dan beban tanggungan biaya, KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang juga menjelaskan hal tersebut dalam akad musyarakahnya. Aturan-aturan mengenai nisbah keuntungan dan beban biaya praktek pembiayaan musyarakah

Berdasarkan teori perbankan syari'ah prinsip musyarakah dijadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) demikian juga dengan masalah beban kerugian yang seharusnya ada dalam ketentuan pembiayaan musyarakah belum diterapkan oleh KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dalam akad maupun praktek. Menurut pihak KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, apabila terjadi kerugian, maka pihak KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang hanya akan meminta pengembalian modal dari nasabah. Realita ini sungguh sangat ironis dengan keberadaan dan keharusan praktek musyarakah menurut fatwa DSN-MUI. Seharusnya dalam kondisi rugi, beban kerugian menjadi tanggungan bersama dan tidak menjadi tanggungan salah satu pihak. Terlebih lagi apa yang dipraktikkan oleh KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang malah akan membuat nasabah semakin merugi, karena di samping kehilangan modal usaha, mereka juga harus mengembalikan "modal" mitranya. Idealnya beban biaya dalam musyarakah menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang bekerjasama secara bersama layaknya pembagian keuntungan. Hal ini juga semakin mengindikasikan bahwa KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang pada satu sisi ingin meraih keuntungan dengan adanya pengembalian modal dan bagi hasil tanpa ingin mengalami kerugian yang ditandai dengan tidak adanya pasal yang mengatur tentang kerugian yang dibagi rata.

Penerapan pembagian keuntungan pada pembiayaan musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang didasarkan pada kuantitas prosentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat berlangsungnya akad. Hal ini memang sejalan dengan ketentuan pembiayaan musyarakah pada fatwa DSN-MUI. Tetapi pada dataran penambahan keuntungan yang didasarkan pada jumlah kerja, KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang belum menerapkannya dalam pembiayaan musyarakah. Pihak nasabah pun tidak pernah meminta hal itu. Ini lebih dikarenakan para nasabah sendiri kurang mengetahui “cara main” pembiayaan musyarakah yang sebenarnya. Para nasabah hanya mengetahui bahwa keuntungan yang mereka peroleh hanya sebatas pada nisbah keuntungan yang telah disepakati.

Masalah beban kerugian yang seharusnya ada dalam ketentuan pembiayaan musyarakah belum diterapkan oleh KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dalam akad maupun praktek. Menurut pihak KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, apabila terjadi kerugian, maka pihak KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang hanya akan meminta pengembalian modal dari nasabah. Realita ini sungguh sangat ironis dengan keberadaan dan keharusan praktek musyarakah menurut fatwa DSN-MUI. Seharusnya dalam kondisi rugi, beban kerugian menjadi tanggungan bersama dan tidak menjadi tanggungan salah satu pihak. Terlebih lagi apa yang dipraktekkan oleh KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang malah akan membuat nasabah

semakin merugi, karena di samping kehilangan modal usaha, mereka juga harus mengembalikan “modal” mitranya.

Idealnya, dalam melakukan sebuah kemitraan, KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang harus berani menerima resiko untuk merugi. Memang modal yang digunakan memang milik orang lain, akan tetapi apakah adil manakala pemilik modal itu hanya mau menerima keuntungan tanpa mau menanggung kerugian.¹⁰

Mekanisme penentuan nisbah tidak selalu sama, seperti sistem bunga yang berlaku di bank konvensional akan tetapi nisbah yang didapatkan sesuai dengan akad, kesepakatan, dan kontribusi dana (modal) yang diberikan dalam kerja sama antara nasabah dan KSPPS /bank syari'ah. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu.¹¹

Islam sebenarnya tidak mengharamkan seorang untuk memiliki harta dan melipat gandakannya, asalkan di peroleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Islam tidak pernah mengecam harta sebagaimana sikap injil mengecam kekayaan, “orang kaya tidak akan dapat menembus pintu-pintu langit, sampai seekor unta dapat menembus lubang djarum.”

¹⁰ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta, UII Press, 2002, h. 42-44.

¹¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, h. 206.

Bahkan Islam justru menegaskan “sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang yang saleh.” Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal, dan dikembangkan secara halal. Artinya dengan usaha legal sesuai syariat dan yang bermanfaat, baik melalui usaha pribadi secara mandiri maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pembagian Laba Rugi di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang

Akad Musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang adalah akad kerja sama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah). Akad Musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian. Akad Musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Mekanisme Akad Musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dimulai dengan permintaan pembiayaan untuk modal kerja dari nasabah dengan modal kerja total.

Ditinjau dari segi fiqih, pembiayaan musyarakah yang diterapkan di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, termasuk ke dalam jenis syirkah ‘inan. Syirkah ‘inan adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama dan membagi keuntungan atau kerugian

secara bersama-sama.¹² Dalam pembiayaan musyarakah ini masing-masing memberikan kontribusi dana dan menanggung resiko secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Ibnu Qadimah yang di kutip oleh M. Syafi'i Antonio, pilihan dalam keuntungan adalah diperbolehkan dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dan yang lain lebih kuat ketimbang yang lain dalam melakukan pekerjaan.¹³ Dalam pembagian untung dan rugi, jika untung dibagi sesuai dengan akad dan jika terjadi kerugian maka kerugian ditanggung oleh bank dan nasabah sesuai jangka waktu yang disepakati.

Dalam beroperasi, suatu bank syari'ah seperti KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang harus memiliki ciri khusus yang menjadi pembeda dari bank-bank umum (konvensional), karena dasar operasional bank syari'ah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah menurut ketentuan Qur'an dan Hadits. Adapun ciri-ciri bank syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas yang wajar. Beban biaya

¹² Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 189

¹³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999, h. 131

tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Untuk sisa hutang setelah masa kontrak berakhir dengan kontrak baru untuk menyelesaikannya.¹⁴

2. Menghindari penggunaan presentase (bunga) dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran, karena presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Akibat penerapan bunga berdasarkan prosentase seperti ini jelas mempunyai maksud yang sama dengan bunga berbunga (*compound interest*), karena setiap bunga yang sudah jatuh temponya dan nasabah tidak mampu lagi membayarnya akan diperhitungkan sebagai bagian utang yang otomatis dan secara terus menerus dikenakan bunga. Hal ini sangat menjerat peminjam yang pada umumnya posisi ekonominya lebih lemah.
3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syari'ah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang ditetapkan di muka, karena pada hakekatnya yang mengetahui tentang untung dan ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Luqman ayat 34, yaitu

¹⁴ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait BMI dan takaful di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, h. 19

وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا... (لقمان: ٣٤)

Artinya: "...dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakan besok..." (QS. Luqman : 34)¹⁵

Tetapi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang menerapkan sistem yang berdasarkan atas penyertaan modal untuk jenis kontrak *musyarakah*, dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang tergantung pada besarnya keuntungan.

KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang tidak menerapkan jual beli atau sewa menyewa uang dari mata uang yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, yang dari transaksi itu mendapatkan keuntungan.¹⁶

4. Adanya dewan pengawas syari'ah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syari'ahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam. Dengan ciri ini diharapkan dapat menjamin operasionalisasi bank syari'ah untuk tidak menyimpang dari tuntunan syari'ah Islam.¹⁷

¹⁵ Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI., 2006, h. 658

¹⁶ Warkum Sumitro, *op.cit.*, h. 20

¹⁷ *Ibid*, h. 20

5. Produk-produk bank syari'ah selalu menggunakan istilah arab, misalnya *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan sebagainya, dimana istilah-istilah tersebut telah dicantumkan dalam kitab-kitab fiqih Islam.¹⁸
6. Adanya produk khusus yang tidak terdapat dalam bank konvensional, yaitu kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, dimana nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikannya.¹⁹
7. Fungsi kelembagaan bank syari'ah selain menjembatani antara pihak pemilik modal atau memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.²⁰

Kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti mempunyai tujuan tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan. Oleh karena itu, maka tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak, dipandang halal atau haram. Akad Musyarakah di KSPPS NU

¹⁸ *Ibid*, h. 20

¹⁹ *Ibid*, h. 22

²⁰ *Ibid*, h. 22

Sejahtera Mangkang Semarang dimulai dengan permintaan pembiayaan untuk modal kerja dari nasabah dengan modal kerja total, obsevasi yang dilakukan oleh KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang terhadap calon nasabah, penentuan nisbah bagi hasil, selanjutnya perjanjian melaksanakan akad yang disepakati bersama baik peraturan dan nisbah bagi hasilnya.

Pola akad yang dilakukan KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dalam pembiayaan musyarakah telah memenuhi asas yang sangat penting yang terdapat di dalam akad jual beli, yaitu:

1. Asas *Al-Ridha'iyyah* (Konsensualisme)
2. Asas *Al-Musawah* (Persamaan Hukum)
3. Asas *Al-Adalah* (Keadilan)
4. Asas *Ash-Shidq* (Kejujuran dan Kebenaran)
5. Asas Manfaat
6. Asas *al-Ta'awun* (Saling Menguntungkan)
7. Asas *Al-Kitabah* (Tertulis).²¹

Di samping itu, melihat ketentuan yang telah ditetapkan KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang sebagaimana tersebut sebelumnya, tampak bahwa pada prinsipnya KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang menginginkan untuk memberikan kemudahan dan keringanan pada para nasabahnya. Terbukti

²¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001, h. 250

dengan ketentuan ketentuan yang dirumuskan mengenai pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah dengan akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.. (اتمائدة: ١)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...* (QS, Al-Maidah : 1)²²

Musyarakah sendiri adalah dasar kedua dari konsep *profit and loss sharing* (PLS) dalam perbankan Islam. Al-Qur'an menggunakan akar kata istilah musyarakah, yaitu *sy-r-k* sebanyak sekitar 170 kali, walaupun tak satu pun dari ayat ini menggunakan istilah musyarakah persis dengan arti kemitraan dalam suatu kongsi bisnis. Namun demikian, berdasarkan sejumlah ayat al-Qur'an, khususnya surat 4:12 dan 38:24, maupun berdasarkan sejumlah riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi dan para sahabatnya, para fuqaha membenarkan keabsahan musyarakah dalam kongsi bisnis.²³ Dalam fiqih, konsep musyarakah digunakan dalam arti yang lebih luas ketimbang yang digunakan dalam perbankan Islam.

Terkait dengan modal, dalam akad pembiayaan musyarakah yang diterapkan di KSPPS NU Sejahtera Mangkang

²² Soenarjo, dkk., *op.cit.*, h. 156

²³ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta: Paramadina 2004, h. 88.

Semarang, modal ditentukan dengan jelas dalam kontrak dan dalam pengertian moneter. Masing-masing pihak dapat menyerahkan sekian persen modal dan para mitra tidak dituntut untuk memberikan modal dalam jumlah yang sama. Menurut faqih Mazhab Hanafi, Quduri (w. 428/1037), musyarakah dinyatakan sah tanpa mempertimbangkan apakah investasi masing-masing pihak berjumlah sama antara yang satu dengan lain.²⁴

Musyarakah dalam fiqih menunjukkan bahwa musyarakah adalah suatu kontrak yang lazimnya diikuti oleh para mitra yang setara, artinya kedua belah pihak sepakat dengan syarat-syarat kontrak, dan salah satu pihak tidak boleh mendiktekan syarat-syarat tersebut kepada pihak yang lain. Tidak seperti mudharabah, dimana investor tetap menjadi pihak yang lebih kuat bila dilihat dari sudut pandang kepemilikan modalnya. Pembiayaan dalam musyarakah disediakan oleh kedua belah pihak, meskipun dalam beberapa kasus barangkali salah satu pihak menyediakan prosentase modal lebih banyak dari pada pihak yang lain. Sebagai salah satu contoh kesetaraan wewenang yang dimiliki oleh para mitra, menurut mazhab Hanafi, masing-masing mitra dapat mendelegasikan fungsi penjualan, pembelian, penyewaan, dan pengupahan kepada seorang wakil, tetapi pihak mitra yang lain memiliki hak untuk membebastugaskan si wakil dari fungsinya.

²⁴ *Ibid*, h.89

Dalam fiqih, kebebasan signifikan diberikan kepada mitra yang mengurus musyarakah. Si mitra dapat menjalankan bisnis dengan cara apapun yang dapat membantu terwujudnya tujuan perjanjian, yaitu menghasilkan laba. Ia tidak boleh mengambil tindakan apapun yang bertentangan dengan tujuan dasar ini. Ibn Qudamah menyebutkan sejumlah tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh si mitra, misalnya memerdekakan budak (barangkali budak yang dimiliki oleh salah satu mitra), dan meminjamkan uang milik kemitraan, alasan tindakan semacam ini, meskipun pada dasarnya baik, adalah tidak kondusif untuk tujuan musyarakah, yaitu untuk menghasilkan laba.²⁵

Mazhab Hanafi tampaknya cenderung memberikan kebebasan lebih kepada mitra yang mengelola. Menurut mereka, mitra yang tidak terlibat dalam jual beli tidak dapat bahkan memberikan suatu barang yang dimiliki oleh musyarakah sebagai suatu janji atau jaminan. Jika ia melakukannya, maka tindakanya tidak sah, dan ia harus bertanggung-jawab atasnya.

Di lain pihak, mitra pengelola mempunyai hak untuk memberikan barang-barang milik musyarakah sebagai jaminan dan untuk menerima perjanjian dari pihak lain. Kalangan Mazhab Syafi'i dan Hambali memegang pandangan bahwa masing-masing mitra dapat menjalankan hubungan kemitraan demi kepentingan musyarakah menurut lazimnya praktik dagang. Menurut Ibn

²⁵ Abdullah Saeed, *op.cit.*, h. 90

Qudamah, si mitra dapat melakukan apa saja yang dalam kepentingan bisnis berdasarkan kemitraan karena inilah praktek yang lazim dalam perdagangan.²⁶

Dilihat dari segi jaminan yang dilakukan dalam akad pembiayaan musyarakah yang diterapkan di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, seluruh empat mazhab fiqih berpendirian bahwa si mitra adalah orang terpercaya. Berdasar pada konsep ‘percaya’ ini, mitra yang satu tidak menuntut jaminan dari pihak lain. Menurut faqih Mazhab Hanafi, Sarakhsi, “masing-masing mereka (para mitra) adalah yang dipercaya atas apa yang diamanahkan kepadanya. Sebuah ketentuan dalam kontrak yang (menyatakan) bahwa seseorang yang dipercaya memberikan jaminan akan dianggap tidak ada dan batal.”²⁷

Akad pembiayaan musyarakah yang diterapkan di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang sendiri akad pembiayaan musyarakah memiliki mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan karakteristik yang digambarkan di atas. Ini artinya sejauh yang diamati oleh penulis, prosedur yang dikhawatirkan terjadi seperti yang diduga oleh penulis, tidak terbukti.

Hanya saja penulis memberikan beberapa catatan terkait dengan hal ini. Satu diantaranya adalah pembebanan terhadap nasabah berupa adanya jaminan. Seperti yang telah diterangkan dalam bab sebelumnya bahwa prosedur musyarakah yang sesuai

²⁶ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari’ah*, h. 90

²⁷ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari’ah*, h. 91

dengan hukum Islam tidak menuntut adanya jaminan. Tetapi akad pembiayaan musyarakah yang diterapkan di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, penulis menemukan adanya prosedur yang meminta nasabah untuk memberikan jaminan.

Jadi meski pada prinsipnya apa yang dilaksanakan dalam akad pembiayaan musyarakah yang diterapkan di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang sesuai dengan prinsip hukum Islam, tetapi pembebanan jaminan ini merupakan sesuatu yang berada di luar prinsip-prinsip normatif mengenai musyarakah. Inilah barangkali catatan yang penulis berikan terhadap prosedur akad pembiayaan musyarakah yang diterapkan di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang.

Selain itu dalam salah satu penyaluran pembiayaan musyarakah yang diterapkan di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang kesusiannya dengan hukum Islam bisa terlihat dari prosedur pembiayaan yang telah dijelaskan dimuka. Melihat prosedur pembiayaan musyarakah yang diterapkan di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang maka kita bisa mengetahui secara pasti apakah praktek pembiayaannya sudah sesuai dengan fiqh ataukah belum. Hal ini bisa terlihat dari:

1. Syarat modal

- a. Modal musyarakah harus ditentukan secara jelas dalam kontrak dan dalam ketentuan moneter. Musyarakah tidak sah jika jumlah modal tidak diketahui dengan jelas karena

akan susah dalam mengetahui untung ataupun rugi yang didapat.

- b. Modal musyarakah adalah jumlah uang yang dikeluarkan KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang untuk membiayai modal kerja nasabah sesuai perhitungan atau analisa kebutuhan modal kerja (KMK).
 - c. Modal musyarakah harus digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan pembiayaan yang terdapat dalam formulir.
2. Perhitungan bagi hasil

Nisbah bagi hasil ditetapkan melalui negosiasi antara pihak KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dengan nasabah, walaupun pihak bank mempunyai patokan minimal dalam bagi hasilnya. Dalam negosiasi ini timbul kesepakatan antara KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dan nasabah dalam berbagi keuntungan dan kerugian. Besarnya hasil usaha yang diperoleh baik nasabah maupun pihak bank amat tergantung pada nisbah yang disetujui pada awal akad. Dalam hal ini ulama fiqh membuat kaidah bahwa keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan perbandingan prosentase dalam jumlah modalnya.

3. Pembayaran angsuran
- a. Nasabah diwajibkan menyerahkan laporan realisasi usaha secara periodik kepada KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang sebagai dasar penghitungan pembayaran bagi hasil.

- b. Keuntungan dari pengembangan dana musyarakah dibagikan kepada KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dan nasabah sesuai nisbah (porsi) bagi hasil yang disepakati.
 - c. Pembayaran angsuran oleh nasabah dilakukan dengan cara pengembalian modal dan bagi hasil secara bulanan sampai masa pembiayaan berakhir.
4. Resiko usaha
- a. Apabila terjadi kegagalan usaha yang menyebabkan kerugian dikarenakan kelalaian oleh pihak nasabah maka resiko tersebut ditanggung sepenuhnya oleh nasabah dan menjadi hutang nasabah kepada KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang.
 - b. Bila kerugian itu terjadi akibat force majeure atau bencana alam maka resikonya akan ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. 61
5. Pemutusan kontrak musyarakah
- Pembiayaan musyarakah dapat dihentikan sebelum jangka waktunya apabila:
- a. Nasabah terbukti melanggar hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak.
 - b. Nasabah dan pihak bank sepakat untuk mengakhiri kontrak.

- c. Meninggalnya salah satu syarik.
 - d. Terjadi kecenderungan penurunan usaha nasabah secara terus menerus.
6. Akad Pembiayaan

Akad musyarakah sah jika ada ijab (penyerahan harta dari pemilik modal) dan Qabul (yang diberi modal menerimanya). Adapun rukun musyarakah menurut jumhur ulama' ada 3 yaitu pelaku akad (nasabah dan bank), ma'qud alaih (modal, usaha, keuntungan) dan sighat (ijab dan qabul).

Para ulama' sepakat bahwa akad musyarakah tidak wajib sebelum pihak pelaksana memulai usahanya, karena pemilik modal dan pelaksana bisa membatalkannya, dengan alasan jika akad itu dibatalkan setelah beroperasi akan membawa madhorot baik terhadap pemberi atau penerima modal. Adapun syarat sahnya pembatalan itu adalah salah satu pihak memberitahu tentang pembatalan kerjasama tersebut.

7. Jaminan atau agunan

Jika dilihat dari fiqh, kontrak musyarakah hanya didasarkan atas unsur kepercayaan (*trust*) dan tidak dikenal adanya jaminan. Adapun jaminan yang diminta oleh bank adalah untuk menjamin ketertiban dalam pengembalian dana dan mengantisipasi modal yang tidak kembali. Dalam menjalankan amanahnya, nasabah memberikan jaminan baik berupa akte tanah, BPKB kendaraan dan lain sebagainya. Adapun jaminan dapat dicairkan apabila nasabah benar-benar

terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam aqad. Berkaitan dengan pembiayaan musyarakah bila ditinjau dari aspek resiko dengan diberlakukannya anggunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaan, maka tidak adanya keadilan antara pihak nasabah dan bank, karena dalam pendanaan Islam maka baik nasabah maupun bank harus sama-sama menanggung resiko dengan sistem profit and loss sharing. Keharusan pemberian jaminan oleh nasabah kepada bank berarti hanya nasabah yang menanggung resiko apabila terjadi kerugian, sedangkan bank akan terbebas menanggung kerugian karena ada sumber untuk meminimalisir resiko yaitu dengan hasil penjualan jaminan.

Dalam perbankan syari'ah tidak diperkenankan meminta jaminan karena dalam pendanaan Islam yang terpenting adalah kepercayaan, sehingga transaksi musyarakah bank tidak boleh mengandalkan jaminan karena dengan adanya jaminan bank tidak akan meneropong watak, karakter dari nasabah karena hanya mengandalkan jaminan yang dapat menutup kerugian.

Dengan melihat mekanisme diatas, pembiayaan musyarakah yang dipraktekkan di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dilihat dari syarat modal, penghitungan nisbah bagi hasil, akad pembiayaan serta resiko usaha dalam konsep fiqh ternyata sudah terpenuhi. Dan menurut hemat penulis

akad pembiayaan yang dipraktekkan oleh KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang ini sah dengan syarat-syaratnya yang telah terpenuhi dengan benar. Akan tetapi dalam pembiayaannya ada salah satu poin yang telah dijelaskan diawal bahwa KSPPS NU Sejahtera Mangkang tidak jauh beda dengan bank konvensional yaitu memakai agunan atau jaminan dan tatkala nasabah kolaps nilai jaminan menjadi milik bank. Jadi penulis merasa bahwa dalam pembiayaan musyarakah melibatkan resiko yang paling mendekati operasi-operasi bank konvensional yang berdasarkan bunga dan tidak sesuai dengan syari'ah. Karena dalam syari'ah diasumsikan lebih mengutamakan kelayakan usaha, agar semua orang baik pengusaha maupun bukan mempunyai kesempatan untuk berusaha disamping moral agama yang harus dijadikan landasan utamanya, tetapi dalam prakteknya jaminan dari nasabah yang digunakan sebagai syarat utama sehingga orang yang tidak mempunyai jaminan tidak mempunyai kesempatan. Pertimbangan lain jika jaminan masih digunakan sebagai syarat dalam pembiayaan musyarakah maka tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Karena dalam musyarakah keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama-sama oleh kedua belah pihak.

Namun menurut Ketentuan Pembiayaan Musyarakah dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah adalah sebagai berikut :

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran harus dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra harus melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian)

a. Modal

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama.
- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini dia boleh menuntut bagian tambahan keuntungan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu

alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.

- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan oleh seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bila keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Pembolehan pemberlakuan jaminan dalam pembiayaan musyarakah sebagaimana termaktub dalam fatwa DSN-MUI di atas lebih dikarenakan kekhawatiran apabila pihak nasabah (pihak

yang diajak bekerjasama oleh Lembaga Keuangan Syari'ah/LKS) melakukan penyelewengan maupun pengingkaran perjanjian dalam musyarakah. Sehingga secara tidak langsung “aturan” ini cenderung lebih bermanfaat sebagai pelindung LKS dari kerugian akibat penyelewengan tersebut. Hal ini dilakukan mengingat modal yang berasal dan dikeluarkan LKS merupakan modal yang berasal dari anggota LKS. Sedangkan ketetapan jumhur ulama mengenai ketidakbolehan adanya jaminan dikarenakan prinsip dasar musyarakah adalah saling percaya. Sehingga keberadaan jaminan dianggap sebagai salah satu wujud ketidakpercayaan di antara pihak yang bekerjasama.

Jika ditinjau dari hukum Islam, keberadaan jaminan memang diperbolehkan tetapi dalam lingkup jual beli sebagaimana tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 283. Itupun dilaksanakan apabila pihak-pihak yang melakukan jual beli tersebut dalam keadaan sebagai berikut :

1. Belum saling mengenal dan baru pertama kali bertemu
2. Kedua belah pihak belum saling mengetahui tempat tinggalnya
3. Pihak yang bertransaksi tidak berlokasi di dekat tempat transaksi

Penjelasan di atas menggambarkan bahwasanya jaminan diperbolehkan apabila kedua belah pihak yang melakukan transaksi belum saling mengenal. Sehingga apabila di suatu waktu yang telah ditentukan sebagai batas waktu pembayaran, pihak

yang berhutang tidak membayar kekurangannya, sementara pihak terhutang tidak mengetahui lokasi pihak berhutang, maka jaminan tersebut berfungsi sebagai pengganti sisa hutang pembayaran.

Berdasar pada ketentuan jaminan tersebut, maka akan sangat tidak relevan manakala diberlakukan dalam praktek pembiayaan musyarakah. Hal ini tidak terlepas dari praktek musyarakah – sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI – yang telah dipraktekkan oleh LKS dan terdapat ketentuan kerja secara garis sebagai berikut :

1. Identitas pihak yang bekerjasama jelas dan tertuang dalam akad musyarakah.
2. Pihak LKS berhak melakukan survei terhadap calon pihak yang diajak bekerjasama terkait dengan lokasi usaha dan kondisi ekonomi.

Adanya survei tentu saja mengindikasikan bahwasanya dalam mencari rekan kerja, LKS memiliki peluang untuk melakukan penyeleksian baik dalam tingkat kepercayaan maupun tingkat ekonomi. Sehingga sangat kontradiksi sekali manakala setelah dilakukan penyurveian tetap saja tidak ada kepercayaan terhadap partner kerja tersebut. Jika masih ada keraguan (baca : ketidakpercayaan terhadap rekan kerja) maka seharusnya LKS membatalkan atau mengganti rekanan kerja tidak sebaliknya, memaksakan bekerjasama dengan memberlakukan jaminan. Islam sendiri sangat jelas memerintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang masih bersifat ragu.

Selain faktor kontradiksi antara proses survei dengan fungsi jaminan, faktor ketidakpercayaan LKS terhadap nasabah (calon rekan kerja) juga sangat menyimpang dari ajaran Islam sendiri. Hal itu dapat dilihat dari salah satu hadits Nabi yang berbunyi,

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُيْ سَلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(متفق عليه)

Artinya: *Dari Ibn Umar r.a, ia berkata, bahwa Rasulullah Saw, bersabda seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menganiayanya dan tidak boleh menyarahkannya (kepada musuhnya), siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan (membalas) membantu keperluannya... (HR. Bukhari Muslim).*²⁸

Hadits di atas menjelaskan bahwasanya seorang yang beriman haruslah memiliki rasa cinta kepada sesamanya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Salah satu indikasi dari bentuk cinta itu sendiri adalah adanya kepercayaan kepada

²⁸ A Husaini dan Majid Hisyam, *Syarah Riyadhus Shalihin, Jilid I*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993, h. 420

saudaranya sesama mu'min. Sehingga pemberlakuan jaminan yang harus ada dalam musyarakah selain bermakna adanya unsur tidak percaya antar sesama mu'min, secara tidak langsung mengartikan bahwasanya pihak yang bekerjasama (LKS) tidaklah memiliki “cinta” kepada saudaranya dan lebih mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi. Islam menyuruh umatnya agar tolong menolong dalam artian lengkap, yaitu dalam menolong sesama muslim tidak saling membedakan antara golongan umat beragama, menghendaki supaya kita memberikan pertolongan kepada semua hamba Allah dan Islam juga menyerukan kepada umatnya agar menjadi warga masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat luas.²⁹

Dalam hal pengawasan KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang memang telah benar-benar melakukannya dengan teliti dan seksama dengan meminta laporan keuangan secara periodic dari mitra bisnisnya. Tetapi dalam hal pembinaan KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang kurang begitu (atau bahkan tidak) memiliki peranan sama sekali. Mitra usaha dibiarkan bekerja dan mengembangkan usahanya sendiri. Padahal jika merujuk pada fatwa DSN-MUI, KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang harus memiliki komitmen terhadap pembagian kerja yang telah disepakati bersama.

²⁹ Moh. Rifa'i, *Akhlaq Seorang Muslim*, Semarang: Wicaksana, 1986, h. 345

Meskipun Pihak Kedua (nasabah) diberi kewenangan dalam mengelola usaha, kewenangan yang diberikan tersebut masihlah sebatas pada “kerja” yang berkaitan dengan usahanya. Semisal, mitra KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dalam usaha bengkel hanya diberi wewenang dalam memperbaiki kendaraan-kendaraan yang rusak, sedangkan wewenang untuk mengembangkan usaha dengan improvisasi diri selama tidak melanggar atau merugikan unit usaha tidak diberikan oleh KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang kepada mitra usahanya.

Hal demikian seolah menandakan bahwasanya KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang meragukan kapasitas mitra usahanya dalam membuka jaringan usaha. Padahal jika berkaca pada syarat pihak yang bekerjasama dalam fatwa DSN-MUI seharusnya KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang memberikan wewenang tersebut sebab secara tidak langsung persetujuan antara KSPPS dengan nasabah menandakan bahwa nasabah tersebut memang benar-benar memiliki kompetensi sebagai wakil usaha. Wakil usaha yang tidak hanya bergelut dengan pengelolaan usaha di tempat semata, namun juga kompetensi sebagai wakil dalam mengembangkan jenis usaha.

Selain mengindikasikan keraguan KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang terhadap kemampuan mitranya, realita di atas sekaligus juga menandakan egoisme dan arogansi KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang. Seharusnya setiap mitra dalam sebuah kerjasama memiliki wewenang yang sama antara satu

dengan yang lainnya. Akan halnya yang terjadi dalam praktek pembiayaan musyarakah KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang. Apabila kewenangan yang diberikan memang memiliki porsi yang sama, seharusnya pihak nasabah juga memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan-kebijakan atau langkah bisnis KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang terkait dengan usaha yang dilaksanakan bersama. Termasuk dalam hal menginvestasikan dana usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Proses akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dilakukan dengan melalui tahap sosialisasi, Permohonan Pembiayaan oleh nasabah, tahap investigasi dan tahap monitoring, setelah tahap ini dilakukan maka terjadi adanya akad pembiayaan musyarakah antara nasabah dan KSPPS NU Sejahtera dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.
2. praktik pembagian laba rugi dalam akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dengan cara harus dikuantifikasikan, dibagikan secara proporsional atas dasar keuntungan, sedangkan kerugian ditanggung para mitra karena disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha, maka kerugian ditanggung oleh pengelola dan menjadi piutang KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang dan sistem pembagian keuntungan harus jelas tertuang dan sesuai dalam akad.
3. Pandangan hukum Islam tentang praktik pembagian laba rugi dalam akad musyarakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang

Semarang pada dasarnya boleh karena laba dan kerugian merupakan kesepakatan bersama, namun beban biaya yang banyak dibebankan pada nasabah, adanya barang jaminan, dan adanya setoran bulanan menjadikan akad yang dilakukan seperti akad utang, sehingga nantinya ketika terjadi kerugian usaha nasabah beban kerugian akan banyak berada pada nasabah bukan ditanggung bersama.

B. Saran-Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang pada proses kinerjanya hendaknya mendahulukan sistem syariah, profesionalisme dan menjadi lembaga koperasi yang dapat mengayomi masyarakat sekitar.
2. Bagi pihak anggota KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang Demak untuk memahami betul tentang pembiayaan musyarakah, sehingga tidak ada penyesalan dikemudian hari dan merugikan salah satu pihak..
3. Bagi semua orang muslim untuk menghindari praktek kerja sama yang merugikan salah satu pihak..

\

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: CV. Alfabeta, 2003
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2001
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabet, 1990
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Badruzaman, Miriam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Bag Penerbit Fak Hukum UII, 2000
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 2006
- Dewi, Gemala dan Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grop, 2005

- Fatah, Munawir Abdul, Muhammad Adib Bisri, *AL-BISRI Kamus Arab Indonesia Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999
- Ghufron, Mas'adi A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hasan, M. Ali, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Humam, Kamal Ibnu, *Fathul Qadir*, Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th.
- Husaini, A dan Majid Hisyam, *Syarah Riyadhus Shalihin, Jilid I*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993
- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta, UII Press, 2002
- Jaziri, Abdurrahman Al-, *Kitab Al-Fiqh'ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz III, Libanon: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyyah, 1990
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Kasani, Al, *Badai' Ash Shanai'*, Juz 6, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Khathab, Al, *Mawahibul Jalil*, Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th.

Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002

Muhamad *ed*, *Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003

-----, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: PSEI, 2003

Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: A Munawwir, t.th.

Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Madah University Press, 2005

Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia 2003.

Qordhowi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, t.th.

Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*, Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th.

Rifa'I, Moh., *Akhlak Seorang Muslim*, Semarang: Wicaksana, 1986

-----, *Jawahirul fiqhi Mutiara Fiqih Jilid II*, Semarang: CV. Wicaksana, 1998

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 13*, Bandung: PT. Al Ma'arif, t.th.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta: Paramadina 2004
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- , *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: PT. Petrajaya Mitrajaya, 2001
- , *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Shon'ani, Ash, *Subul as-Salam*, Juz 3, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1998
- Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI., 2006
- Sri, Susilo Y., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2001
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonsia, 2004
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait BMI dan takaful di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Syirazi, Asy, *Al Muhadzab*, Juz 1, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Novilatul Rahmawati
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 04 Desember 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Puguh RT. 01/03 Pegandon, Kab. Kendal

Jenjang Pendidikan :

Formal :

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. MI NU 46 Winong | Lulus Tahun 2005/2006 |
| 2. SMP N 02 Pegandon | Lulus Tahun 2008/2009 |
| 3. MA NU 03 Sunan Katong Kaliwungu | Lulus Tahun 2011/2012 |

Demikian Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Januari 2018

Penulis,

Novilatul Rahmawati

NIM. 122311088